



LAPORAN TAHUNAN 2024



BPSI LINGKUNGAN PERTANIAN

BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN SUMBER DAYA LAHAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN



AGROSTANDAR

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, Laporan Tahunan 2024 Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian (BPSI Lingkungan Pertanian) dapat diselesaikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. BPSI Lingkungan Pertanian, sebagai unit kerja Eselon III Badan Standardisasi Instrumen Pertanian mempunyai mandat untuk melaksanakan Perumusan Rancangan Standar dan Pengujian Instrumen Lingkungan Pertanian.

Pencapaian keberhasilan yang diperoleh oleh BPSI Lingkungan Pertanian merupakan hasil dari penguatan sumberdaya, organisasi, dan perbaikan proses bisnis internal BPSI Lingkungan Pertanian secara konsisten, yang merupakan kontribusi seluruh jajaran BPSI Lingkungan Pertanian untuk berupaya mendorong tercapainya IKU yang telah ditetapkan. Hal tersebut merupakan bentuk dari pengimplementasian *core values* Aparatur Sipil Negara yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (BERAKHLAK). Selain itu, perbaikan secara terus menerus perlu ditanamkan kepada seluruh jajaran BPSI Lingkungan Pertanian dalam bekerja dan memberikan pelayanan. Apresiasi seluruh pihak eksternal yang telah bekerja sama dengan internal BPSI Lingkungan Pertanian baik seluruh Kementerian/Lembaga, Eselon I dan Eselon II lingkup Kementerian Pertanian, Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah, Swasta maupun seluruh masyarakat dapat terjalin dengan baik dan bermanfaat untuk membangun Pertanian Indonesia yang Maju, Mandiri dan Modern.

Laporan Tahunan 2024 ini diharapkan bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban dan umpan balik bagi instansi untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja BPSI Lingkungan Pertanian. Kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam penyusunan laporan ini kami sampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami berharap adanya masukan, saran, dan umpan balik dari para pembaca yang bersifat membangun untuk kemajuan BPSI Lingkungan Pertanian di masa yang akan datang. Semoga Laporan Tahunan ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.



Pati, 31 Desember 2024

Kepala Balai,

Agus Hasbianto, SP., M.Si., Ph.D

NIP. 197808172002121004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
PENDAHULUAN.....	1
ORGANISASI	2
2.1 Kedudukan BPSI Lingkungan Pertanian.....	2
2.2 Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
2.3 Struktur Organisasi.....	3
SUMBER DAYA MANUSIA	5
3.1 Jumlah Pegawai	5
3.2 Mutasi Pegawai.....	6
3.3 Pegawai Pensiun.....	7
3.4 Tugas Belajar.....	7
3.5 Izin Belajar.....	8
3.6 Kenaikan Pangkat.....	8
3.7 Kenaikan Gaji Berkala	9
3.8 Penghargaan Pegawai.....	10
AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	12
4.1 Realisasi Anggaran	12
4.2 Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.....	12
4.3 Pengelolaan Hibah Luar Negeri.....	13
4.4 Pengelolaan Barang Milik Negara.....	13
SARANA PRASARANA	17
4.1 Laboratorium	17
4.2 Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP).....	18
4.3 Layanan Publik.....	19
4.4 Kendaraan Dinas.....	20
4.5 Sarana Penunjang Lainnya.....	21
CAPAIAN KINERJA	22
5.1 Perumusan PNPS BPSI Lingkungan Pertanian.....	22

5.2	Konsep Rancangan Standardisasi Lingkungan Pertanian.....	22
5.3	Seminar Pelaporan Tengah Tahun	32
5.4	Peningkatan Kualitas Laboratorium BPSI Lingkungan Pertanian	32
5.5	Pemeliharaan Sistem Mutu SNI ISO 9001:2015	40
5.6	Keterbukaan Informasi Publik.....	49
5.7	Pelaksanaan Pengelolaan Program Dukungan Manajemen	51
5.8	Kunjungan Tamu	52
5.9	Praktek Kerja Lapang dan Magang (MBKM dan Reguler).....	53
5.10	Kegiatan Pendampingan	54
5.11	Pameran/Ekspose.....	55
5.12	Perpustakaan.....	56
5.13	Pengelolaan Media Sosial dan Website	57
5.14	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.....	59
5.15	Pelaksanaan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan dan Survei Persepsi Anti Korupsi.....	60
5.16	Paten.....	60
5.17	Publikasi	61
5.18	Kerjasama	62
5.19	Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian.....	62
PENUTUP		64

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Mutasi Pegawai	6
Tabel 2. Daftar Pegawai Pensiun	7
Tabel 3. Daftar Pegawai Tugas Belajar	7
Tabel 4. Daftar Pegawai Ijin Belajar	8
Tabel 5. Daftar Kenaikan Pangkat Pegawai	9
Tabel 6. Daftar Kenaikan Gaji Berkala Pegawai	10
Tabel 7. Daftar Pegawai Penerima Penghargaan Satyalancana Karya Satya	11
Tabel 8. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja	12
Tabel 9. Penerimaan PNPB	12
Tabel 10. Pagu dan Realisasi Hibah Luar Negeri	13
Tabel 11. Penetapan Status BMN	14
Tabel 12. Daftar Penghapusan BMN	15
Tabel 13. Tambahan Aset BMN	16
Tabel 14. Daftar Laboratorium BPSI Lingkungan Pertanian	17
Tabel 15. Daftar Kendaraan Dinas BPSI Lingkungan Pertanian	20
Tabel 16. Perubahan Kategori Bahan atau Produk yang Diuji Pada Re-Asesmen Laboratorium	33
Tabel 17. Jumlah Sampel Laboratorium BPSI Lingkungan Pertanian	35
Tabel 18. Daftar <i>Inhouse Training, Workshop</i> , dan Bimbingan Teknis	37
Tabel 19. Hasil Uji Profisiensi Tanah, Tanaman, dan Pupuk Organik	38
Tabel 20. Hasil asesmen Z/Z'-Score	38
Tabel 21. Daftar Kalibrasi Alat Laboratorium BPSI Lingkungan Pertanian	39
Tabel 22. Daftar Revisi Pedoman Mutu	42
Tabel 23. Daftar Ketidaksesuaian Pada Audit Internal 1	44
Tabel 24. Daftar Ketidaksesuaian Pada Audit Internal 2	44
Tabel 25. Ketidaksesuaian dan Peluang Peningkatan Ketidaksesuaian	47
Tabel 26. Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Publik BPSI Lingkungan Pertanian	50
Tabel 27. Daftar Peserta Magang di BPSI Lingkungan Pertanian	53
Tabel 28. Kegiatan pendampingan/narasumber BPSI Lingkungan Pertanian	54
Tabel 29. Daftar Kunjungan di Perpustakaan BPSI Lingkungan Pertanian	56
Tabel 30. Platform media sosial BPSI Lingkungan Pertanian	57
Tabel 31. Postingan berita pada berbagai platform media sosial BPSI Lingkungan Pertanian	58

Tabel 32. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.....	59
Tabel 33. Nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan dan Indeks Persepsi Anti Korupsi.....	60
Tabel 34. Daftar Penilaian Atas Tingkat Komersial Paten.....	61
Tabel 35. Daftar Publikasi BPSI Lingkungan Pertanian di Warta Sumber Daya Lahan Pertanian	61
Tabel 36. Daftar Kerjasama BPSI Lingkungan Pertanian.....	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kedudukan BPSI Lingkungan Pertanian dalam Struktur Organisasi BSIP	2
Gambar 2. Struktur Organisasi BPSI Lingkungan Pertanian	4
Gambar 3. Keragaan Pegawai Berdasarkan Jabatan	5
Gambar 4. Keragaan Pegawai Berdasarkan Pendidikan	6
Gambar 5. Keragaan Pegawai Berdasarkan Golongan	6
Gambar 6. Gedung Laboratorium BPSI Lingkungan Pertanian.....	18
Gambar 7. Kawasan IP2SIP BPSI Lingkungan Pertanian.....	18
Gambar 8. Sarana dan Prasarana Publik.....	19
Gambar 9. Sarana Penunjang BPSI Lingkungan Pertanian.....	21
Gambar 10. Usulan PNPS BPSI Lingkungan Pertanian	22
Gambar 11. Rapat Teknis 1 RSNI1 Pengelolaan Hama Terpadu Ulat Grayak (Spodoptera frugiperda J.E. Smith) Pada Tanaman Jagung	25
Gambar 12. Rapat Teknis 2 RSNI2 Pengelolaan Hama Terpadu Ulat Grayak (Spodoptera frugiperda J.E. Smith) Pada Tanaman Jagung	25
Gambar 13. Rapat Konsensus RSNI3 Pengelolaan Hama Terpadu Ulat Grayak (Spodoptera frugiperda J.E. Smith) Pada Tanaman Jagung	25
Gambar 14. Pelaksanaan jajak pendapat RSNI3 Pengelolaan Hama Terpadu Ulat Grayak (Spodoptera frugiperda J.E. Smith) Pada Tanaman Jagung	26
Gambar 15. Dokumen SNI 9282:2024 tentang Pengelolaan Hama Terpadu Ulat Grayak (Spodoptera frugiperda J.E. Smith) Pada Tanaman Jagung	26
Gambar 16. Rapat Teknis 1 RSNI1 Kualitas Tanah – Penentuan Kadar Pestisida Organoklorin Menggunakan Kromatografi Gas Dengan Deteksi Selektif Massa (GC-MS) dan Kromatografi Gas Dengan Deteksi Penangkapan Elektron (GC-ECD)	28
Gambar 17. Rapat Konsensus RSNI3 Kualitas Tanah – Penentuan Kadar Pestisida Organoklorin Menggunakan Kromatografi Gas Dengan Deteksi Selektif Massa (GC-MS) dan Kromatografi Gas Dengan Deteksi Penangkapan Elektron (GC-ECD)	28
Gambar 18. Pelaksanaan jajak pendapat RSNI3 “Kualitas Tanah – Penentuan Kadar Pestisida Organoklorin Menggunakan Kromatografi Gas Dengan Deteksi Selektif Massa (GC-MS) dan Kromatografi Gas Dengan Deteksi Penangkapan Elektron (GC-ECD)”	28
Gambar 19. Dokumen SNI ISO 23646:2022 tentang Kualitas Tanah – Penentuan Kadar Pestisida Organoklorin Menggunakan Kromatografi Gas Dengan Deteksi Selektif Massa (GC-MS) dan Kromatografi Gas Dengan Deteksi Penangkapan Elektron (GC-ECD)	29

Gambar 20. Rapat Teknis 1 RSNI1 Batas Maksimum Residu Pestisida Pada Komoditas Pertanian Asal Tumbuhan	30
Gambar 21. Rapat Teknis 2 RSNI2 Batas Maksimum Residu Pestisida Pada Komoditas Pertanian Asal Tumbuhan	30
Gambar 22. Rapat Konsensus RSNI3 Batas Maksimum Residu Pestisida Pada Komoditas Pertanian Asal Tumbuhan	30
Gambar 23. Pelaksanaan jajak pendapat RSNI3 Batas Maksimum Residu Pestisida Pada Komoditas Pertanian Asal Tumbuhan	31
Gambar 24. Dokumen SNI 7313:2024 tentang Batas Maksimum Residu Pestisida Pada Komoditas Pertanian Asal Tumbuhan	31
Gambar 25. Pelaksanaan Seminar Pelaporan Tengah Tahun	32
Gambar 26. Sertifikat Akreditasi Laboratorium BPSI Lingkungan Pertanian	34
Gambar 27. Lampiran Sertifikat Akreditasi Laboratorium BPSI Lingkungan Pertanian.....	34
Gambar 28. Jumlah Sampel Laboratorium BPSI Lingkungan Pertanian Tahun 2024.....	35
Gambar 29. Persentase Jumlah Sampel Laboratorium BPSI Lingkungan Pertanian.....	36
Gambar 30. Komposisi Pelanggan Laboratorium BPSI Lingkungan Pertanian.....	36
Gambar 31. Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Laboratorium BPSI Lingkungan Pertanian	37
Gambar 32. Rapat Koordinasi Tim ISO BPSI Lingkungan Pertanian	41
Gambar 33. Kegiatan Tinjauan Dokumen SNI ISO 9001:2015 di BPSI Lingkungan Pertanian	41
Gambar 34. Sosialisasi Dokumen SNI ISO 9001:2015 BPSI Lingkungan Pertanian	43
Gambar 35. Rapat Tinjauan Manajemen BPSI Lingkungan Pertanian.....	46
Gambar 36. Audit Surveillance 1 BPSI Lingkungan Pertanian.....	48
Gambar 37. Sertifikat SNI ISO 9001:2015 BPSI Lingkungan Pertanian	48
Gambar 38. Studi Banding Tim PPID BPSI Lingkungan Pertanian ke Polbangtan Yoma dan BBVet Wates.....	50
Gambar 39. Predikat Informatif dan Petugas Terbaik PPID Tahun 2024	51
Gambar 40. Satker Terbaik III Penilaian Indikator Kinerja IKPA Kategori Pagu Sedang dan Penilaian Pelaksanaan Rekonsiliasi Penyampaian dan Kualitas Data Laporan Keuangan Semester I.....	51
Gambar 41. Jumlah Kunjungan Tamu BPSI Lingkungan Pertanian	52
Gambar 42. Komposisi Pengunjung BPSI Lingkungan Pertanian.....	52
Gambar 43. Komposisi Peserta Magang BPSI Lingkungan Pertanian.....	54
Gambar 44. BPSI Lingkungan Pertanian di Jateng Agro-Inovation Expo (JAE).....	56

Gambar 45. Promosi Koleksi Perpustakaan Melalui Media Sosial dan Whatsapp.....	57
Gambar 46. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian di Kab. Kudus dan Kab. Pati	63

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan menyatakan bahwa sarana prasarana pertanian mulai dari benih, bibit, pupuk, hingga alat dan mesin pertanian harus memenuhi standar mutu dan disertifikasi. Berdasarkan hal tersebut Kementerian Pertanian melaksanakan reorganisasi dengan membentuk Unit Kerja Eselon 1 yang memiliki tugas standardisasi instrumen pertanian dan disahkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian. Perpres tersebut diikuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 19 Tahun 2022 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian dan Permentan Nomor 13 Tahun 2023 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP).

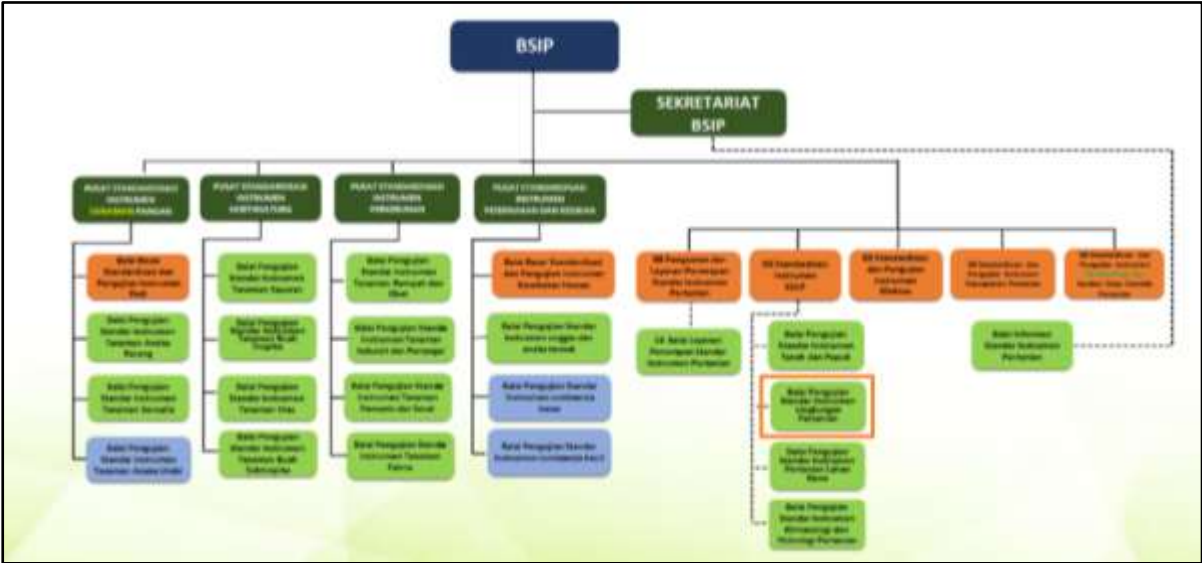
Sesuai Perpres Nomor 117 Tahun 2022, tugas BSIP adalah menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen di bidang pertanian. Adapun fungsi dari BSIP yaitu sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen di bidang pertanian.
2. Pelaksanaan koordinasi perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrument di bidang pertanian.
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan koordinasi perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen di bidang pertanian.
4. Pelaksanaan tugas administrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Balai Pengujian Standar dan Instrumen Lingkungan Pertanian (BPSI Lingkungan Pertanian) sebagai salah satu UPT lingkup BSIP, mengacu pada Permentan Nomor 13 Tahun 2023 pasal 138 memiliki tugas melaksanakan pengujian standar instrumen lingkungan pertanian. Laporan Akhir BPSI Lingkungan Pertanian tahun 2024 ini merupakan laporan pelaksanaan kegiatan BPSI Lingkungan Pertanian selama Tahun 2024 yang mencakup manajemen kelembagaan, ketatausahaan dan sumberdaya pendukung, program kerja dan monitoring evaluasi, dan Sistem Pengendalian Internal (monev-SPI), serta kegiatan penyebarluasan hasil standar dan kegiatan kerjasama. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) DIPA BPSI Lingkungan Pertanian tahun 2024 serta anggaran dari kegiatan kerjasama. Laporan ini disusun secara ringkas, tetapi tidak mengurangi maksud dan tujuan dari masing-masing kegiatan.

2.1 Kedudukan BPSI Lingkungan Pertanian

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, BPSI Lingkungan Pertanian merupakan salah satu unit pelaksana teknis lingkup BSIP yang berada dibawah koordinasi BBPSI SDLP.



Gambar 1. Kedudukan BPSI Lingkungan Pertanian dalam Struktur Organisasi BSIP

2.2 Tugas Pokok dan Fungsi

BPSI Lingkungan Pertanian merupakan salah satu unit kerja di bawah koordinasi Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian (BBPSI SDLP) berdasarkan Permentan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. BPSI Lingkungan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pengujian standar instrumen lingkungan pertanian. Dalam melaksanakan tugasnya, BPSI Lingkungan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran pengujian standar instrumen lingkungan pertanian.
2. Pelaksanaan pengujian standar instrumen lingkungan pertanian.
3. Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi lingkungan pertanian.
4. Pelaksanaan layanan pengujian dan penilaian kesesuaian standar instrumen lingkungan pertanian.
5. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyebarluasan hasil standardisasi instrumen lingkungan pertanian.

6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian standar instrumen lingkungan pertanian.
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSI Lingkungan Pertanian.

2.3 Struktur Organisasi

BPSI Lingkungan Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Balai (Eselon IIIA) yang dibantu oleh 1 (satu) pejabat struktural (Eselon IVA), yaitu Kepala Subbagian Tata Usaha yang bertugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, serta penatausahaan barang milik negara. Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 279 KPTS/OT.050/M/06/2023, BPSI Lingkungan Pertanian juga mempunyai 2 (dua) Tim Kerja pada kelompok jabatan fungsional yang terdiri atas:

1. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi Lingkungan Pertanian; dan
2. Tim Kerja Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Lingkungan Pertanian.

Adapun uraian tugas dari masing-masing Tim Kerja yaitu sebagai berikut:

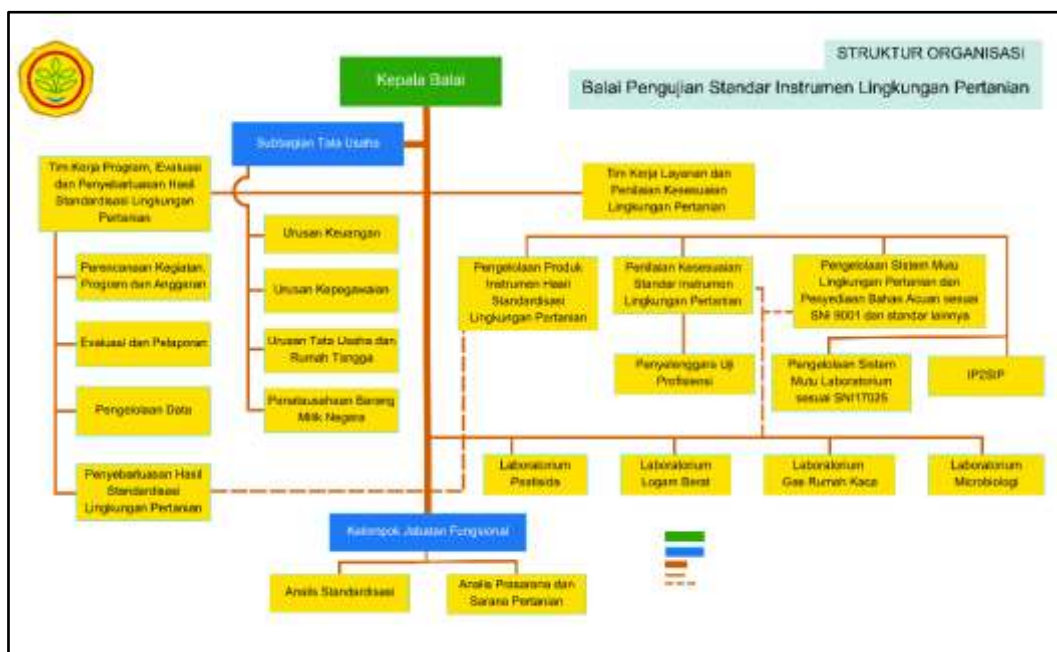
1. Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi Lingkungan Pertanian melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, program, dan anggaran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pengelolaan data, serta penyebarluasan hasil standar instrumen lingkungan pertanian
2. Tim Kerja Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Lingkungan Pertanian melakukan layanan pengujian, dan penilaian kesesuaian standar instrumen lingkungan pertanian, pengelolaan sistem mutu laboratorium sesuai dengan SNI ISO/IEC 17025:2017 serta standar pengelolaan lembaga penilaian kesesuaian lainnya, pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi lingkungan pertanian, dan pengelolaan sistem mutu lingkungan pertanian dan penyediaan bahan acuan sesuai SNI ISO 9001:2015 serta standar lain.

Selain Subbag Tata Usaha dan Tim Kerja, juga terdapat beberapa bagian yang diberikan tugas dan tanggung jawab terkait pengelolaan Laboratorium Pengujian dan Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP) yaitu sebagai berikut:

1. Manajer Administrasi (MA) Laboratorium yang dirangkap oleh Kasubbag Tata Usaha.
2. Manajer Mutu (MM) Laboratorium yang dirangkap oleh Ketua Tim Kerja Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Lingkungan Pertanian.
3. Manajer Teknis (MT) Laboratorium yang bertanggung jawab pada layanan teknis pengujian laboratorium.
4. Deputi MM bertanggung jawab untuk mendukung dan membantu Manajer Mutu dalam menjalankan tugas-tugas terkait sistem manajemen mutu laboratorium.

5. Deputi MA bertanggung jawab untuk membantu dan mendukung Manajer Administrasi dalam mengelola berbagai aspek administratif laboratorium.
6. Deputi MT Laboratorium Gas Rumah Kaca yang bertanggung jawab pada layanan teknis pengujian emisi gas rumah kaca (CH_4 , N_2O , dan CO_2).
7. Deputi MT Laboratorium Logam Berat yang bertanggung jawab pada layanan teknis pengujian kualitas tanah serta pencemaran logam berat dalam tanah, air (termasuk air permukaan dan air limbah), pupuk organik (baik padat maupun cair), serta produk pertanian/jaringan tanaman.
8. Deputi MT Laboratorium Pestisida yang bertanggung jawab pada layanan teknis pengujian mutu pestisida pada produk pestisida, serta residu pestisida pada tanah, air, komoditas kering, komoditas dengan kadar air tinggi, dan komoditas dengan kadar asam tinggi.
9. Deputi MT Laboratorium Mikrobiologi yang bertanggung jawab pada layanan teknis pengujian mikrobiologi (total bakteri/TPC).
10. Manajer Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian yang bertanggung jawab pada pengelolaan dan operasional kebun pengujian.

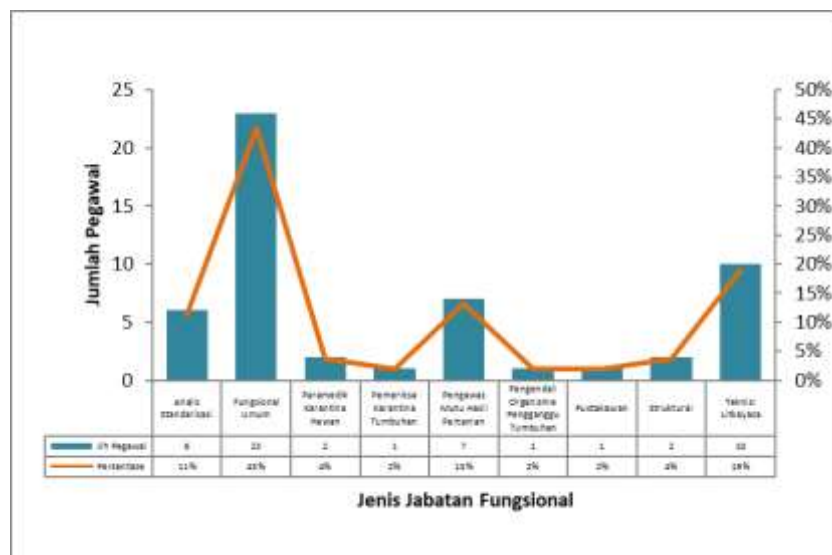
Sebagai wujud manajemen satu pintu dan untuk memudahkan kontrol, struktur BPSI Lingkungan Pertanian melekat dengan laboratorium sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen balai.



Gambar 2. Struktur Organisasi BPSI Lingkungan Pertanian

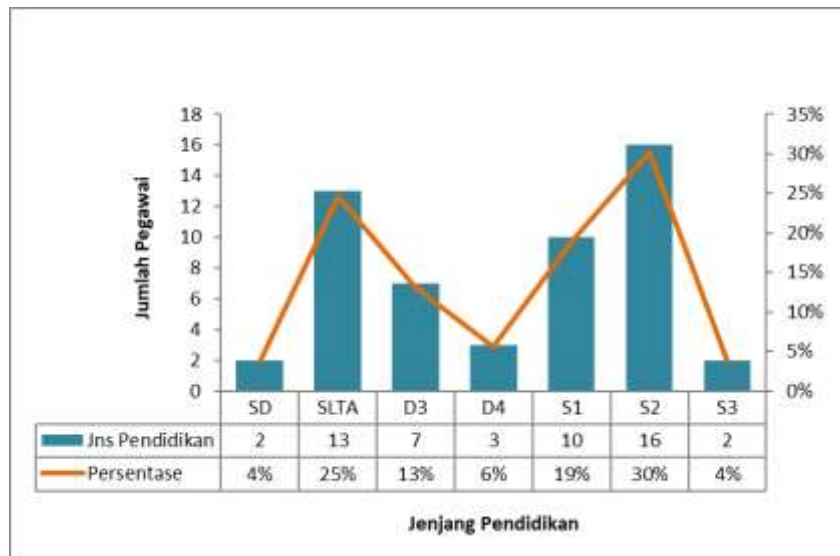
3.1 Jumlah Pegawai

Pada tahun 2024, BPSI Lingkungan Pertanian didukung oleh 77 orang pegawai yang terdiri atas 53 orang ASN, 1 orang PPPK, dan 23 orang PPNP dengan berbagai jabatan, baik fungsional umum maupun fungsional tertentu. Jabatan fungsional tertentu yang mendukung tugas dan fungsi BPSI Lingkungan Pertanian diantaranya Analis Standardisasi (ASTA), Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT), Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP), Paramedik Karantina Hewan, Pemeriksa Karantina Tumbuhan, Pustakawan, dan Teknisi Litkayasa. Berdasarkan jabatannya pegawai BPSI Lingkungan Pertanian terdiri dari 6 orang ASTA, 2 orang Paramedik Karantina Hewan, 1 orang Pemeriksa Karantina Tumbuhan, 7 orang PMHP, 1 orang POPT, 1 orang Pustakawan, 10 orang Teknisi Litkayasa, 2 orang Struktural, dan 23 orang Fungsional Umum.



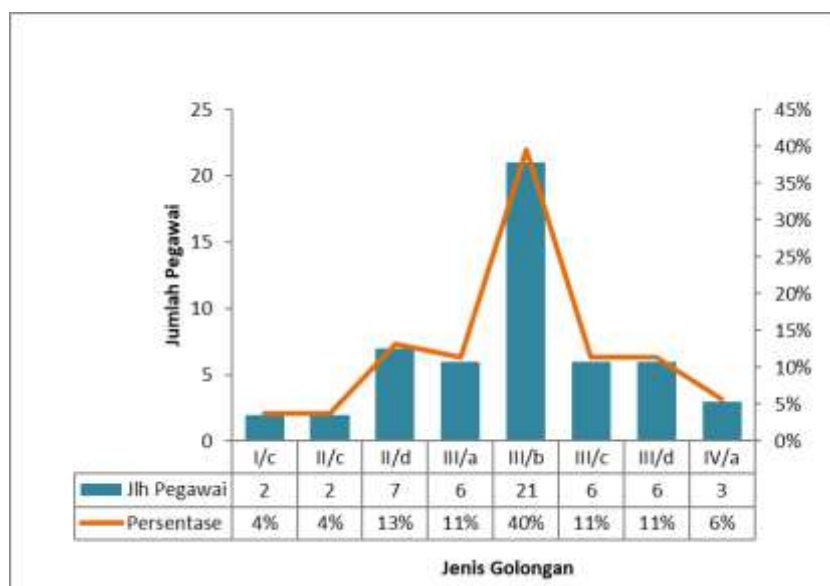
Gambar 3. Keragaan Pegawai Berdasarkan Jabatan

Jumlah pegawai ASN BPSI Lingkungan Pertanian berdasarkan pendidikan per Desember 2024 terdiri dari 2 orang berpendidikan S3, 16 orang berpendidikan S2, 10 orang berpendidikan S1, 3 orang berpendidikan D4, 7 orang berpendidikan D3, 13 orang berpendidikan SLTA, dan 2 orang berpendidikan SD.



Gambar 4. Keragaan Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Jumlah pegawai ASN BPSI Lingkungan Pertanian berdasarkan golongan per Desember 2024 terdiri dari 2 orang golongan I, 9 orang golongan II, 39 orang golongan III, dan 3 orang golongan IV.



Gambar 5. Keragaan Pegawai Berdasarkan Golongan

3.2 Mutasi Pegawai

Pada tahun 2024, SDM BPSI Lingkungan Pertanian bertambah 3 orang karena adanya mutasi dari Badan Karantina. Mutasi pegawai adalah perpindahan tugas atau lokasi seorang pegawai. Mutasi dapat terjadi di dalam satu instansi, antar instansi, atau ke perwakilan Indonesia di luar negeri. Pedoman tata cara pelaksanaan mutasi pegawai diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 5 Tahun 2019.

Tabel 1. Daftar Mutasi Pegawai

No.	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Jabatan	TMT
1	Marta Sumarno, A.Md	198403062009011005	Penata Muda Tk.I/IIIb	Paramedik Karantina Hewan Mahir	1 Februari 2024
2	Sri Lestari, A.Md	199210092019022001	Pengatur TK.I/IIId	Paramedik Karantina Hewan Terampil	1 Februari 2024
3	Guntur Shahid, A.Md	199309022019021001	Pengatur TK.I/IIId	Pemeriksa Karantina Tumbuhan Terampil	1 Februari 2024

3.3 Pegawai Pensiun

Pada tahun 2024, SDM BPSI Lingkungan Pertanian berkurang 2 orang karena telah memasuki masa pensiun. Adapun syarat bagi seorang pegawai untuk mendapatkan pensiun yaitu telah mencapai usia pensiun, telah diberhentikan dengan hormat dan memiliki masa kerja untuk pensiun.

Tabel 2. Daftar Pegawai Pensiun

No.	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Jabatan	Ket
1	Agustina Sri Purwestri	196608112002122001	Penata Muda Tk.I/IIIb	Penelaah Teknis Kebijakan	1 September 2024
2	Supadi	196612312012121010	Juru/Ic	Operator Layanan Operasional	1 Januari 2025

3.4 Tugas Belajar

Untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas SDM BPSI Lingkungan Pertanian agar sesuai dengan tuntutan pekerjaan, maka salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi melalui tugas dan izin belajar. Tugas belajar merupakan penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pegawai untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai pegawai. Pedoman pemberian tugas belajar dan izin belajar pegawai lingkup Kementerian Pertanian diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2021. Adapun SDM BPSI Lingkungan Pertanian yang melaksanakan tugas belajar sebanyak 1 orang.

Tabel 3. Daftar Pegawai Tugas Belajar

No.	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Jabatan	Jenjang Pendidikan
1	Rina Kartikawati, SP., M. Agr.	198204212006042001	Pembina/IVa	Penelaah Teknis Kebijakan	S3

3.5 Izin Belajar

Pada tahun 2024, SDM pegawai BPSI Lingkungan Pertanian yang melaksanakan tugas belajar sebanyak 11 orang. Izin belajar adalah persetujuan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan formal dengan biaya sendiri dengan tetap melaksanakan tugas kedinasan.

Tabel 4. Daftar Pegawai Ijin Belajar

No.	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Nama Jabatan	Jenjang Pendidikan
1	Suharsih S. Si	197205271998032001	Penata Tk. I/IIId	ASTA Ahli Muda	S2
2	Titi Sopiawati, SP	197708082000032001	Penata Tk. I/IIId	ASTA Ahli Muda	S2
3	Fitra Purnariyanto, A.Md A.K	198108012006041001	Penata Muda Tk.I/IIId	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Mahir	S1
4	Suryani	197310022007011001	Penata Muda/IIIa	Pengolah Data dan Informasi	S1
5	Supraptiningsih	197901122007012001	Penata Muda/IIIa	Pengadministrasi Perkantoran	S1
6	Sukur Basuki	197905112007011001	Penata Muda/IIIa	Pengolah Data dan Informasi	S1
7	Aji Ispatrika, A.Md.	199305242019021001	Penata Muda/IIIa	Operator Laboratorium	S1
8	Sri lestari, A.Md	199210092019022001	Pengatur TK.I/IIId	Paramedik Karantina Hewan Terampil	S1
9	Guntur Shahid, A.Md	199309022019021001	Pengatur TK.I/IIId	Pemeriksa Karantina Tumbuhan Terampil	S1
10	Mayang Fikra, A.Md.	199504292019022003	Pengatur TK.I/IIId	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Terampil	S1
11	Debby Oktaviani	199310172015032001	Pengatur TK.I/IIId	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Terampil	S1

3.6 Kenaikan Pangkat

Kenaikan pangkat untuk pegawai diatur oleh BKN melalui Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2023. Kenaikan pangkat dilaksanakan enam kali dalam setahun, yaitu pada tanggal 1 Februari, 1 April, 1 Juni, 1 Agustus, 1 Oktober, dan 1 Desember. Berdasarkan jenisnya kenaikan pangkat dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Kenaikan Pangkat Reguler, diberikan kepada pegawai yang menduduki jabatan pelaksana dan memenuhi persyaratan, seperti memiliki angka kredit yang cukup dan penilaian kinerja yang baik.
2. Kenaikan Pangkat Pilihan, diberikan kepada pegawai yang memiliki kinerja dan keahlian luar biasa, menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara, atau memperoleh ijazah/sertifikasi tertentu.

Adapun pegawai BPSI Lingkungan Pertanian yang mendapatkan kenaikan pangkat pada tahun 2024 adalah sebanyak 8 orang.

Tabel 5. Daftar Kenaikan Pangkat Pegawai

No.	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
1	Dolty Mellyga W.P, S.Si, M.Sc	198105032014032003	Penata/IIIC	Pengolah Data dan Informasi
2	Ukhwatul Muanisah, A.Md	198504172011012012	Penata/IIIC	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Penyelia
3	Elga Riesta Puteri, S.Si, M.Sc	199508012018012002	Penata Muda Tk.I/IIIB	Pengolah Data dan Informasi
4	Angga Nurkholis, SE	198904202020121003	Penata Muda Tk.I/IIIB	Penelaah Teknis Kebijakan
5	Duri	197205152006041002	Penata Muda/IIIA	Operator Laboratorium
6	Mayang Fikra, A.Md.	199504292019022003	Pengatur TK.I/IIId	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Terampil
7	Debby Oktaviani	199310172015032001	Pengatur TK.I/IIId	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Terampil
8	Purwono	198410092007101001	Pengatur/IIc	Operator Layanan Operasional

3.7 Kenaikan Gaji Berkala

Kenaikan gaji berkala adalah kenaikan gaji yang diberikan kepada pegawai yang telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala dan apabila telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kenaikan gaji berkala untuk pertama kali bagi seorang pegawai negeri sipil yang diangkat dalam golongan I, II, III diberikan setelah mempunyai masa kerja 2 (dua) tahun sejak diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil dan selanjutnya 2 (dua) tahun sekali, kecuali untuk pegawai negeri sipil yang pertama kali diangkat dalam golongan II/a diberikan kenaikan gaji berkala pertama kali setelah mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun dan selanjutnya setiap 2 (dua) tahun sekali. Adapun pegawai BPSI Lingkungan Pertanian yang mendapatkan kenaikan gaji berkala pada tahun 2024 adalah sebanyak 18 orang.

Tabel 6. Daftar Kenaikan Gaji Berkala Pegawai

No.	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
1	Dr. Miranti Ariani, SP., M.Si	198103222006042001	Pembina/IVa	Penelaah Teknis Kebijakan
2	Rina Kartikawati, SP., M.Agr	198204212006042001	Pembina/IVa	Penelaah Teknis Kebijakan
3	Ali Pramono, SP., M.Biotech	197310252001121001	Penata Tk.I/IIIId	ASTA Ahli Muda
4	Hesti Yulianingrum, SP, M.Sc	199007132014032001	Penata/IIIc	Pengolah Data dan Informasi
5	Baiq Nunung Sulastri, S.Si	199011152018012002	Penata Muda Tk.I/IIIb	Pengolah Data dan Informasi
6	Ika Ferry Yuniarti, SP., M.Sc	198506132014032001	Penata Muda Tk.I/IIIb	PMHP Ahli Pertama
7	Sri Hartini	196906031993032001	Penata Muda Tk.I/IIIb	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Mahir
8	Sudarmin	196805161998031001	Penata Muda Tk.I/IIIb	Pengolah Data dan Informasi
9	Suryanto, SST	197711102007011001	Penata Muda Tk.I/IIIb	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Mahir
10	Yono, SST	198002132007101001	Penata Muda Tk.I/IIIb	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Mahir
11	Edi Suprptomo, SST	198012202008121001	Penata Muda Tk.I/IIIb	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Mahir
12	Jumari	196905042007011001	Penata Muda Tk.I/IIIb	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Mahir
13	Slamet Rianto	197706262007101001	Penata Muda Tk.I/IIIb	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Mahir
14	Sarah, SP.	199210032018012002	Penata Muda/IIIa	PMHP Ahli Pertama
15	Suryani	197310022007011001	Penata Muda/IIIa	Pengolah Data dan Informasi
16	Suprptiningsih	197901122007012001	Penata Muda/IIIa	Pengadministrasi Perkantoran
17	Sukur Basuki	197905112007011001	Penata Muda/IIIa	Pengolah Data dan Informasi
18	Putri Yunita Lutfiani, A.Md	199706222022032001	Pengatur/IIC	Penelaah Teknis Kebijakan

3.8 Penghargaan Pegawai

Satyalancana Karya Satya adalah sebuah penghargaan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia kepada pegawai negeri sipil yang telah berbakti selama 10, 20, atau 30 tahun. Satyalancana Karya Satya diberikan kepada pegawai yang menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, dan kedisiplinan. Adapun pegawai BPSI Lingkungan Pertanian yang menerima penghargaan SLKS adalah sebanyak 13 orang.

Tabel 7. Daftar Pegawai Penerima Penghargaan Satyalancana Karya Satya

No.	Nama	NIP	Jabatan	Penghargaan
1	Eni Yulianingsih, SP., MP	197807302009122001	ASTA Ahli Muda	Satyalancana Karya Satya X Tahun
2	M. Latif Habibi, SE	197910272006041001	Ka. Subbag Tata Usaha	Satyalancana Karya Satya X Tahun
3	Wahyu Purbalisa, SP.	197907302009122002	PMHP Ahli Muda	Satyalancana Karya Satya X Tahun
4	Sri Hartini	196906031993032001	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Mahir	Satyalancana Karya Satya X Tahun
5	Suryanto, SST	197711102007011001	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Mahir	Satyalancana Karya Satya X Tahun
6	Yono, SST	198002132007101001	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Mahir	Satyalancana Karya Satya X Tahun
7	Edi Suprptomo, SST	198012202008121001	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Mahir	Satyalancana Karya Satya X Tahun
8	Agustina Sri Purwestri	196608112002122001	Penelaah Teknis Kebijakan	Satyalancana Karya Satya X Tahun
9	Slamet Rianto	197706262007101001	Teknisi Penelitian dan Perekayasaan Mahir	Satyalancana Karya Satya X Tahun
10	Purwanto	197512292007011001	Pengolah Data dan Informasi	Satyalancana Karya Satya X Tahun
11	Suprptiningsih	197901122007012001	Pengadministrasi Perkantoran	Satyalancana Karya Satya X Tahun
12	Sukur Basuki	197905112007011001	Pengolah Data dan Informasi	Satyalancana Karya Satya X Tahun
13	Suyoto	197301071999031002	Pengadministrasi Perkantoran	Satyalancana Karya Satya X Tahun

4.1 Realisasi Anggaran

Anggaran yang dikelola BPSI Lingkungan Pertanian untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan adalah total sebesar Rp. 8.498.067.000,-. Namun, terdapat pagu blokir sebesar Rp. 335.000.000,- sehingga pagu efektif adalah sebesar Rp. 8.163.067.000,- Realisasi anggaran BPSI Lingkungan Pertanian per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 8.131.026.100,- atau sebesar 99,61% berdasarkan pagu efektif. Realisasi anggaran BPSI Lingkungan Pertanian berdasarkan jenis belanja yaitu belanja pegawai sebesar Rp. 3.740.908.419,- dari pagu efektif Rp. 3.769.819.000,- atau 99,23%, belanja barang dan jasa sebesar Rp. 4.298.867.681,- dari pagu efektif Rp. 4.299.959.000,- atau 99,97%, dan belanja modal sebesar Rp. 91.250.000,- dari pagu efektif sebesar Rp. 93.289.000,- atau 97,81%.

Tabel 8. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja

No.	Jenis Belanja	Pagu (Rp. 000)	Pagu Blokir (Rp. 000)	Pagu Efektif (Rp. 000)	Realisasi (Rp. 000)	%
1	Pegawai	3.769.819	-	3.769.819	3.740.909	99,23
2	Barang dan Jasa	4.634.959	335.000	4.299.959	4.298.868	99,97
3	Modal	93.289	-	93.289	91.250	97,81
Total		8.498.067	335.000	8.163.067	8.131.027	99,61

4.2 Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BPSI Lingkungan Pertanian diperoleh dari hasil penerimaan umum dan fungsional. Pada tahun 2024, target penerimaan umum sebesar Rp. 8.178.000,- dan target penerimaan fungsional adalah sebesar Rp. 657.064.000,-. Realisasi penerimaan umum sebesar Rp. 28.013.834,- atau 342,56% yang diperoleh dari hasil sewa rumah dinas, gedung, lahan, pengembalian belanja pegawai tahun 2024, dan denda keterlambatan pekerjaan. Realisasi penerimaan fungsional sebesar Rp. 758.521.400,- atau 116,00% yang diperoleh dari hasil samping kebun, jasa mess tamu, layanan kunjungan agroeduwisata, dan layanan jasa analisa laboratorium.

Tabel 9. Penerimaan PNBP

No.	Hasil Penerimaan	Target (Rp. 000)	Realisasi (Rp. 000)	%
1	Umum	8.178	28.014	342,56
2	Fungsional	657.064	758.522	116,00

4.3 Pengelolaan Hibah Luar Negeri

Anggaran hibah luar negeri langsung uang BPSI Lingkungan Pertanian pada tahun 2024 diperoleh dari National Agriculture and Food Research Organization (NARO) – JEPANG untuk kegiatan *Development of Comprehensive Rice Cultivation Technologies that Reduce Greenhouse Gas Emmission in Asia* dan dari Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS) - JEPANG untuk kegiatan *Implementation of the second and third field experiments for MACS project in Indonesia*.

Tabel 10. Pagu dan Realisasi Hibah Luar Negeri

No.	Judul Kegiatan	Mitra	Pagu (Rp. 000)	Realisasi (Rp. 000)	%
1	Development of Comprehensive Rice Cultivation Technologies that Reduce Greenhouse Gas Emmission in Asia	National Agriculture and Food Research Organization (NARO) - JEPANG	105.440	105.440	100,00
2	Implementation of the second and third field experiments for MACS project in Indonesia	Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS) - JEPANG	154.639	154.639	100,00
Total			260.079	260.079	100,00

4.4 Pengelolaan Barang Milik Negara

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi yang meliputi penatausahaan pada pengguna/kuasa pengguna barang dan pengelola barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Penatausahaan Barang Milik Negara mempunyai kewenangan dan tugas sebagai berikut :

1. Menginformasikan jika terdapat kesalahan akun Belanja Modal, serta menyampaikan hasil verifikasi penggunaan anggaran Belanja Modal.
2. Menyusun, mengolah dan menginput dokumen SPM, SP2D, dan Kontrak Kerja sebagai bahan
3. Penyusunan laporan BMN dengan menggunakan program aplikasi SAI bidang BMN sebagai laporan sistem akuntansi instansi.
4. Menerima data dari aplikasi persediaan untuk digabung dengan aplikasi SIMAK BMN, sehingga tersedia laporan SIMAK BMN dan mencerminkan laporan persediaannya.
5. Mengirim data dari SIMAK BMN untuk belanja modal sebagai penggabungan dengan SAK, serta membuat file kirimke unit UAPB Eselon I sebagai bahan penggabungan laporan di tingkat Eselon I.
6. Menyusun bahan laporan BMN, semester I dan tahunan dengan program SIMAK BMN.

7. Menyusun bahan laporan BMN yang akan di sampaikan ke KPKNL.
8. Menyusun Catatan Atas Laporan BMN (CALB) Satker menyiapkan dan menghimpun data yang berkaitan dengan laporan barang sebagai bahan tindak lanjut terhadap hasil review inspektorat Jenderal dan BPK terhadap Laporan Barang Satker.
9. Melakukan penghapusan dan lelang BMN.

Penetapan Status Penggunaan BMN (PSP BMN) merupakan kegiatan menetapkan kewenangan penggunaan atas suatu BMN yang digunakan, dikuasai, dan menjadi tanggung jawab dari satker yang mengajukan usulan PSP BMN. *Output* dari kegiatan ini berupa Surat Keputusan (SK) yang dapat diterbitkan oleh Pengelola Barang maupun Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan pendelegasian kewenangan usulan PSP BMN.

Surat Keputusan PSP BMN yang diterbitkan oleh Pengelola Barang maupun Pengguna Barang memuat informasi mengenai identitas dari barang yang ditetapkan statusnya sebagai BMN pada Pengguna Barang dari satuan kerja bersangkutan, misalnya untuk BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan antara lain yaitu Kode Barang, NUP, Jenis BMN, Lokasi BMN, Luas BMN, Tahun Perolehan, Nilai Perolehan, dan Dokumen Kepemilikan. Sedangkan untuk BMN berupa Selain Tanah dan/atau Bangunan, yang membedakan yaitu tidak adanya informasi mengenai Lokasi dan Luas BMN, melainkan digantikan dengan informasi terkait *Merk/Type* serta Kuantitas BMN. Selain memuat informasi mengenai identitas BMN, di dalam SK PSP BMN juga termuat informasi bagi satker yang status barangnya ditetapkan sebagai BMN yaitu dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan kepada pihak lain setelah mendapatkan persetujuan dari Pengelola Barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kewajiban Pengguna Barang untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan BMN, serta pertanggungjawaban Pengguna Barang atas segala biaya untuk pengamanan dan pemeliharaan BMN yang ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang.

Tabel 11. Penetapan Status BMN

No.	Uraian	Sudah Ditetapkan (Rp.000)	Belum Ditetapkan (Rp.000)
1	Tanah	80.101.863	0
2	Peralatan dan Mesin	29.555.281	0
3	Gedung dan Bangunan	29.758.477	0
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	12.641.885	0
5	Aset Tetap Lainnya	78.507	0
6	Aset Lainnya (software, paten, hewan ternak)	304.502	0
Total		152.333.564	0

Pada tahun 2024, Tim BMN telah melaksanakan penghapusan aset berupa peralatan dan mesin terdiri dari 134 unit dengan nilai perolehan Rp. 793.390.300,-; kendaraan roda 4 sebanyak 3 unit dengan nilai perolehan Rp. 124.657.400,-; dan kendaraan roda 2 sebanyak 4 unit dengan nilai perolehan Rp. 26.473.000,00.

Tabel 12. Daftar Penghapusan BMN

No.	Nama Barang	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp.000)	Nilai Limit (Rp.000)
A. Peralatan dan Mesin				
1	AC Split	6	29.760	319
2	AC Window	6	36.679	326
3	Amplifier	1	548	5,4
4	Audio Catridge Recorder	1	750	7,5
5	Autoclave (Alat Lab. Umum)	3	23.400	4,6
6	Brandkas	2	143	115
7	Camera Film	2	9.934	1,9
8	Control Clock	1	316	0,063
9	Crawler Tractor + Attachment	2	570	1.267
10	Demineralizer (Alat Laboratorium)	1	5.500	2,7
11	Desintegrator	2	59.758	11,9
12	Gas Detector	1	2.750	1,3
13	Handy Cam	1	10.000	2,0
14	Incubator (Alat Laboratorium)	1	500	10
15	Kabel Rol	1	841	8,4
16	Karaoke	1	109	1,0
17	Kilogram Standar	2	33	3,8
18	Kipas Angin	3	400	10
19	Kromatografi Gas	3	3.525	50
20	Kursi Kayu	4	77	1,5
21	Lap Top	3	50.560	25
22	LCD Proyektor/Infocus	4	111.068	16
23	Lemari Asam	1	24.600	123
24	Meja Kerja Kayu	4	179	2,2
25	Meja Kerja Laboratorium	3	288	0,3
26	Meja Komputer	1	154	0,7
27	Mesin Ketik Manual Standar (14-16 Inci)	4	1.555	22
28	Mesin Pemotong Rumput	5	12.801	128
29	Microphone/Wireless MIC	1	146	1,4
30	Mimbar/Podium	1	115	2,2
31	Note Book	4	42.450	21

No.	Nama Barang	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp.000)	Nilai Limit (Rp.000)
32	Overhead Proyektor	1	939	0,1
33	PC Unit	8	53.618	38
34	Hand Sprayer	3	340	34
35	Personal Komputer	3	25.279	12
36	Photo Tustel	2	40.256	4,4
37	Pompa Airasil	2	330	20
38	Printer	6	7.257	13
39	Rak Kayu	2	67	1,3
40	Scanner (Universal Tester)	4	10.004	14
41	Slide Proyektor	1	29.905	5,9
42	Sound System	1	24.200	4,8
43	Stabilisator	1	1.010	10
44	Stabilizer/UPS	13	93.429	48
45	Tangki Pemanas	1	4.798	2,3
46	Tens Type KE-8700, Auto	2	7.650	3,8
47	Timbangan Halus	4	54.762	11
48	TS Detektor	3	7.024	4,0
49	Water Bath	2	3.000	7,0
B. Kendaraan Roda 2				
1	Sepeda Motor	3	23.943	6.865
2	Besi Tua Sepeda Motor Win	1	2.530	436
C. Kendaraan Roda 4				
1	Jeep	1	27.750	62.600
2	Mini Bus (penumpang <14 orang)	2	96.907	58.352

Pada tahun 2024, BPSI Lingkungan Pertanian mendapatkan tambahan aset berupa peralatan dan mesin sejumlah 14 unit dengan nilai perolehan Rp. 91.250.000,- yang bersumber dari PNBPN.

Tabel 13. Tambahan Aset BMN

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan (Rp.000)	Nilai Perolehan (Rp.000)
1	Printer	2	3.900	7.800
2	AC	6	6.100	36.600
3	LCD Proyektor	2	7.500	15.000
4	Mikrofon Wireless	2	2.300	4.600
5	Webcam Video Conference	1	5.400	5.400
6	Personal Computer	1	21.850	21.850

4.1 Laboratorium

Berdasarkan Permentan Nomor 13 Tahun 2023, BPSI Lingkungan Pertanian memiliki tugas melaksanakan pengujian standar instrumen lingkungan pertanian dan dalam pelaksanaan tugasnya dibawah koordinasi BBPSI SDLP. Adapun salah satu fungsi dari BPSI Lingkungan Pertanian adalah pelaksanaan layanan pengujian dan penilaian kesesuaian standar instrumen lingkungan pertanian. BPSI Lingkungan Pertanian dalam struktur organisasi manajemen memiliki 4 (empat) Laboratorium Pengujian yang dikoordinasikan dalam satu unit Laboratorium BPSI Lingkungan Pertanian.

Tabel 14. Daftar Laboratorium BPSI Lingkungan Pertanian

No.	Nama Laboratorium	Kemampuan Layanan Pengujian	Status Akreditasi
1	Laboratorium Logam Berat	Kualitas tanah serta pencemaran logam berat dalam tanah, air (termasuk air permukaan dan air limbah), pupuk organik (baik padat maupun cair), serta produk pertanian /jaringan tanaman	Terakreditasi
2	Laboratorium Pestisida	Mutu pestisida pada produk pestisida, serta residu pestisida pada tanah, air, komoditas kering, komoditas dengan kadar air tinggi, dan komoditas dengan kadar asam tinggi	Terakreditasi
3	Laboratorium Gas Ruma Kaca	Emisi gas CH ₄ , N ₂ O, dan CO ₂	Terakreditasi
4	Laboratorium Mikrobiologi	Total bakteri/TPC	Belum terakreditasi

Laboratorium BPSI Lingkungan Pertanian telah terakreditasi ISO/IEC KAN 17025:2017 sejak tahun 2011 dan memiliki tupoksi melaksanakan kegiatan layanan pengujian untuk internal institusi maupun bagi konsumen eksternal. Sebagai laboratorium yang telah terakreditasi, laboratorium BPSI Lingkungan Pertanian didukung oleh SDM yang terlatih dan instrumen pengujian yang mutakhir sehingga senantiasa menghasilkan data hasil pengujian yang akurat. Beberapa instrumen pengujian yang terdapat di Laboratorium BPSI Lingkungan Pertanian diantaranya yaitu: *Gas Chromatography Mass Spectrometri* (GC-MS), *Gas Chromatography* (GC), *Atomic Absorption Spectrometry* (AAS), *Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry* (GF-AAS), dan *Spectrophotometer* UV-Vis.



Gambar 6. Gedung Laboratorium BPSI Lingkungan Pertanian

4.2 Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP)

BPSI Lingkungan Pertanian memiliki fasilitas IP2SIP yang terintegrasi dalam satu kawasan di Kec. Jaken, Pati. IP2SIP dahulunya adalah kebun percobaan, namun seiring perubahan tupoksi Balai kemudian fungsinya berubah menjadi *show window* standar pertanian ramah lingkungan dan pengelolaan lahan sawah tadah hujan yang dapat menjadi wahana kunjungan studi banding terutama melalui keberadaan Taman Sains Pertanian. Kegiatan IP2SIP mencakup beberapa sub kegiatan yaitu: (1) Budidaya tanaman pangan dan hortikultura, (2) Teknologi panen air di lahan tadah hujan melalui pengelolaan embung, (3) pengembangan *smart greenhouse* tenaga surya untuk pertanian modern dan ramah lingkungan, (4) Pengelolaan ternak, (5) Kawasan integrasi tanaman ternak (*integrated farming*), dan (6) Pengelolaan pascapanen pertanian.



Gambar 7. Kawasan IP2SIP BPSI Lingkungan Pertanian

4.3 Layanan Publik

Dalam upaya untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, maka BPSI Lingkungan Pertanian telah melakukan penambahan dan perbaikan sarana dan prasarana layanan seperti ruang layanan, ruang bermain anak, jalur evakuasi. Selain itu, pada tahun ini juga telah ditambah kelengkapan sarana dan prasarana untuk penyandang disabilitas seperti parkir dan jalur khusus disabilitas, kursi roda, toilet disabilitas, profil balai dalam huruf braille, dan video profil balai yang disertai bahasa isyarat.



Gambar 8. Sarana dan Prasarana Publik

4.4 Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas yang dimiliki BPSI Lingkungan Pertanian pada tahun 2024 terdiri dari 4 unit kendaraan roda tiga, 6 unit kendaraan roda empat, dan 7 unit kendaraan roda dua. Kendaraan-kendaraan tersebut masih berfungsi dengan baik untuk mendukung aktifitas kegiatan administrasi maupun kegiatan fungsional.

Tabel 15. Daftar Kendaraan Dinas BPSI Lingkungan Pertanian

No.	Nama Kendaraan	Tahun Perolehan	Kondisi
A. Kategori Roda 2 (dua)			
1	Honda/GLM II	1997	Baik
2	Honda/GL160D	2007	Baik
3	Honda/NF125SD	2007	Baik
4	Honda/NF100 SL	2007	Baik
5	Honda/NF100SE	2008	Baik
6	Honda/NF125TR M/T	2013	Baik
7	Kawasaki/LX 150 D (D-TRACKER)	2014	Baik
B. Kategori Roda 3 (tiga)			
1	Viar/VR 150 3R	2011	Baik
2	Kaisar/Triseda	2013	Baik
3	Kaisar/Triseda	2015	Baik
4	Kaisar/Triseda	2015	Baik
C. Kategori Roda 4 (empat)			
1	Isuzu Panther/TBR 54F Turbo LG	2007	Baik
2	Toyota/Hilux 2.5G Double Cabin (4x4)MT	2013	Baik
3	Tyota, Innova G/TGN40RGKMDKD/MPNP	2012	Baik
4	Toyota/Hilux 2.5G Double Cabin (4x4)MT	2013	Baik
5	Mitsubishi L300	2015	Baik
6	Mitsubishi HIACE	2016	Baik

4.5 Sarana Penunjang Lainnya

BPSI Lingkungan Pertanian juga memiliki sarana penunjang lainnya seperti perpustakaan, mess tamu, koperasi, cafetaria, dan perumahan dinas untuk pegawai.



Gambar 9. Sarana Penunjang BPSI Lingkungan Pertanian

5.1 Perumusan PNPS BPSI Lingkungan Pertanian

BPSI Lingkungan Pertanian telah mengajukan 1 (satu) usulan PNPS ke Badan Standardisasi Nasional (BSN) pada tanggal 25 Oktober 2024, yaitu dengan judul: Metode Pengukuran Emisi Gas Metana (CH_4) dan Dinitrogen Oksida (N_2O) di Lahan Sawah – Bagian 2: Spesifikasi dan Pengoperasian Sungkup Tertutup pada Komite Teknis 13-15 Perubahan Iklim. Usulan PNPS telah disetujui oleh BSN untuk dirumuskan sebagai rancangan standar melalui Surat Keputusan Kepala BSN Nomor 8/KEP/BSN/1/2025.



#	JUDUL	RUANG LINGKUP	STATUS	TANGGAL	ACTION
1	Metode Pengukuran Emisi Gas Metana (CH_4) dan Dinitrogen Oksida (N_2O) di Lahan Sawah – Bagian 2: Spesifikasi dan Pengoperasian Sungkup Tertutup pada Komite Teknis 13-15 Perubahan Iklim	Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan	Disetujui	25 Oktober 2024 15:03:19	Publikasi

Gambar 10. Usulan PNPS BPSI Lingkungan Pertanian

5.2 Konsep Rancangan Standardisasi Lingkungan Pertanian

Dalam rangka mendukung visi BSIP sebagai lembaga yang bertanggung jawab di bidang standardisasi di lingkup Kementerian Pertanian, pada tahun 2024 BPSI Lingkungan memiliki sasaran kinerja diantaranya menghasilkan rancangan standar instrumen lingkungan pertanian dengan target capaian kinerja 1 (satu) RSNI. Rangkaian kegiatan perumusan RSNI diawali dengan penyampaian usulan RSNI ke BSN melalui Program Nasional Perumusan Standar (PNPS). PNPS memuat program perumusan SNI dengan judul SNI yang akan dirumuskan beserta pertimbangannya yang minimal memuat: (1) Judul RSNI; (2) Latar belakang dan tujuan perumusan; (3) Acuan perumusan SNI; (4) Metode perumusan SNI; (5) Kerangka substansi SNI; dan 6) Pihak yang akan menerapkan. Dokumen hasil perumusan SNI berdasarkan PNPS disebut Rancangan SNI (RSNI). Pengusulan PNPS dikoordinasikan oleh BSN dan diajukan oleh Pemangku Kepentingan kepada BSN melalui sistem informasi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Selanjutnya, BSN akan melakukan penyusunan PNPS bersama dengan Pemangku Kepentingan. Penyusunan PNPS dilakukan melalui tahap verifikasi kelengkapan, evaluasi kelayakan, publikasi dan pembahasan hasil publikasi. Tahapan

berikutnya yaitu persetujuan PNPS yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BSN. PNPS yang telah ditetapkan menjadi skala prioritas program perumusan SNI.

Perumusan SNI dilaksanakan melalui tahapan penyusunan konsep RSNI, rapat teknis, dan rapat konsensus. Penyusunan konsep RSNI dilakukan oleh Komite Teknis (Komtek) dengan menugaskan konseptor RSNI yang merupakan personel/perseorangan atau gugus kerja yang ditetapkan dan ditugaskan oleh Ketua Komtek atau Sekretariat Komtek. Konsep RSNI disusun berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan standar, selanjutnya dapat dilakukan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka penyusunan data dukung konsep RSNI tersebut. Dokumen hasil penyusunan konsep RSNI disebut RSNI Kesatu (RSNI1).

Dokumen RSNI1 selanjutnya masuk ke tahap rapat teknis untuk membahas substansi teknis dokumen RSNI1. Rapat teknis dipimpin oleh Ketua Komtek dan dihadiri oleh Konseptor, Sekretariat Komtek, serta Anggota Komtek. Apabila diperlukan, rapat teknis dapat mengikutsertakan pemangku kepentingan di luar Anggota Komtek dan dilakukan beberapa kali. Dokumen hasil pembahasan rapat teknis yang telah disepakati disebut dokumen RSNI2.

Dokumen RSNI2 selanjutnya masuk ke tahap rapat konsensus. Rapat konsensus dilaksanakan untuk membahas dokumen RSNI2 hingga tercapai konsensus. Selain pembahasan dokumen RSNI2, rapat konsensus menyepakati penentuan judul bahasa Inggris untuk SNI yang disusun dengan pengembangan sendiri, penentuan klasifikasi SNI berdasar International Classification for Standard (ICS), serta informasi lainnya yang dibutuhkan untuk penetapan SNI. Selain Konseptor, Sekretariat Komtek, dan Anggota Komtek, rapat konsensus juga harus dihadiri oleh Tenaga Pengendali Mutu SNI (TPMS) yang ditugaskan oleh BSN. Tenaga pengendali mutu SNI merupakan personel/perseorangan yang bertugas memantau, mengawasi, dan mengingatkan Komtek dalam proses perumusan SNI serta membuat laporan. Rapat konsensus menghasilkan dokumen RSNI3.

Pelaksanaan jajak pendapat RSNI3 dilakukan dalam jangka waktu 30 hari kalender untuk RSNI3 yang dirumuskan melalui pengembangan sendiri dan adopsi Standar Internasional dengan modifikasi, 15 (lima belas) hari kalender untuk RSNI3 yang dirumuskan melalui adopsi identik metode terjemahan, dan 15 (lima belas) hari kalender atau sesuai kebijakan yang ditetapkan BSN dengan tetap memastikan partisipasi masyarakat dalam jajak pendapat untuk RSNI3 yang dirumuskan melalui PNPS Mendesak. Hasil jajak pendapat selanjutnya dibahas oleh BSN dengan melibatkan komtek sehingga menghasilkan RSNI4.

BSN melakukan validasi terhadap substansi dan penulisan dokumen RSNI4. Dokumen hasil validasi berupa dokumen RASNI. Selanjutnya, dokumen RASNI ditetapkan menjadi SNI melalui Keputusan Kepala BSN. SNI yang telah ditetapkan kemudian disampaikan kepada

Sekretariat Komtek dan BSN mempublikasikan SNI melalui sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Jumlah rancangan standar instrumen pertanian yang dihasilkan pada tahun 2024 adalah 3 standar. Rancangan standar instrumen pertanian yang dihasilkan berupa RSNI yaitu: (1) RSNI Pengelolaan hama terpadu ulat grayak (*Spodoptera frugiperda* J.E. Smith) pada tanaman jagung, (2) RSNI Kualitas tanah – Penentuan kadar pestisida organoklorin menggunakan kromatografi gas dengan deteksi selektif massa (GC-MS) dan kromatografi gas dengan deteksi penangkapan elektron (GC-ECD), dan (3) RSNI Batas maksimum residu pestisida pada komoditas pertanian asal tumbuhan.

Pada Desember 2024, ketiga RSNI tersebut telah ditetapkan menjadi SNI yaitu SNI 9282:2024 tentang Pengelolaan hama terpadu ulat grayak (*Spodoptera frugiperda* J.E. Smith) pada tanaman jagung pada 18 November 2024; 2) SNI ISO 23646:2022 tentang Kualitas tanah – Penentuan kadar pestisida organoklorin menggunakan kromatografi gas dengan deteksi selektif massa (GC-MS) dan kromatografi gas dengan deteksi penangkapan elektron (GC-ECD) pada 29 Oktober 2024; dan 3) SNI 7313:2024 tentang Batas maksimum residu pestisida pada komoditas pertanian asal tumbuhan pada 12 Desember 2024.

1. RSNI Pengelolaan hama terpadu ulat grayak (*Spodoptera frugiperda* J.E. Smith) pada tanaman jagung

RSNI Pengelolaan hama terpadu ulat grayak (*Spodoptera frugiperda* J.E. Smith) pada tanaman jagung merupakan RSNI baru yang disusun dengan jalur pengembangan sendiri. Konsep RSNI disusun oleh tim konseptor yang berasal dari BPSI Lingkungan Pertanian, BPSI Tanaman Serealia, BPSIP Kalimantan Selatan, dan BBPSI SDLP. Standar ini dirumuskan dengan tujuan sebagai pedoman bagi stakeholder untuk melaksanakan pengelolaan hama terpadu ulat grayak (*Spodoptera frugiperda* J.E. Smith) pada tanaman jagung. RSNI ini berisi beberapa strategi pengendalian sesuai dengan prinsip pengelolaan hama terpadu dalam mendukung sistem budidaya pertanian berkelanjutan serta telah divalidasi dalam lingkup petani dan dinilai sebagai strategi yang tepat untuk diterapkan pada pertanaman jagung, khususnya di Indonesia.

RSNI Pengelolaan hama terpadu ulat grayak (*Spodoptera frugiperda* J.E. Smith) pada tanaman jagung telah dibahas dalam dua kali rapat teknis yaitu pada tanggal 24 Juli 2024 dan 22 Agustus 2024. RSNI Pengelolaan hama terpadu ulat grayak (*Spodoptera frugiperda* J.E. Smith) pada tanaman jagung telah dibahas dalam rapat konsensus pada tanggal 19 September 2024 dengan dihadiri oleh *stakeholder* terkait yaitu perwakilan dari pemerintah, pelaku usaha, konsumen, dan pakar. RSNI Pengelolaan hama terpadu ulat grayak (*Spodoptera frugiperda* J.E. Smith) pada tanaman jagung telah disampaikan ke BSN dan telah

melalui tahap jajak pendapat dengan periode waktu dari 3 Oktober-1 November 2024. Pada tanggal 18 November 2024, BSN telah menetapkan RSNI ini menjadi SNI 9282:2024 tentang Pengelolaan hama terpadu ulat grayak (*Spodoptera frugiperda* J.E. Smith) pada tanaman jagung melalui Surat Keputusan Kepala BSN Nomor 547/KEP/BSN/11/2024.



Gambar 11. Rapat Teknis 1 RSNI1 Pengelolaan Hama Terpadu Ulat Grayak (*Spodoptera frugiperda* J.E. Smith) Pada Tanaman Jagung



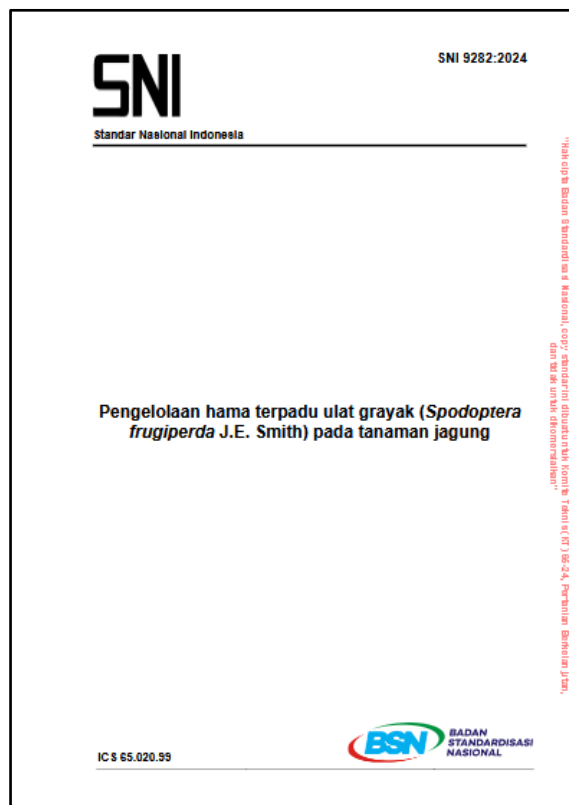
Gambar 12. Rapat Teknis 2 RSNI2 Pengelolaan Hama Terpadu Ulat Grayak (*Spodoptera frugiperda* J.E. Smith) Pada Tanaman Jagung



Gambar 13. Rapat Konsensus RSNI3 Pengelolaan Hama Terpadu Ulat Grayak (*Spodoptera frugiperda* J.E. Smith) Pada Tanaman Jagung



Gambar 14. Pelaksanaan jajak pendapat RSNI3 Pengelolaan Hama Terpadu Ulat Grayak (*Spodoptera frugiperda* J.E. Smith) Pada Tanaman Jagung



Gambar 15. Dokumen SNI 9282:2024 tentang Pengelolaan Hama Terpadu Ulat Grayak (*Spodoptera frugiperda* J.E. Smith) Pada Tanaman Jagung

2. RSNI Kualitas tanah – Penentuan kadar pestisida organoklorin menggunakan kromatografi gas dengan deteksi selektif massa (GC-MS) dan kromatografi gas dengan deteksi penangkapan elektron (GC-ECD)

RSNI Kualitas tanah – Penentuan kadar pestisida organoklorin menggunakan kromatografi gas dengan deteksi selektif massa (GC-MS) dan kromatografi gas dengan deteksi penangkapan elektron (GC-ECD) merupakan RSNI baru yang disusun dengan jalur adopsi tingkat keselarasan dari ISO 23646:2022 *Soil quality – Determination of organochlorine pesticides by gas chromatography with mass selective detection (GC-MS) and gas chromatography with electron capture detection (GC-ECD)* dengan metode adopsi terjemahan satu bahasa. Konsep RSNI disusun oleh tim konseptor yang berasal dari BPSI Lingkungan Pertanian dan BBPSI SDLP. Standar ini menjelaskan penentuan pestisida organoklorin pada tanah dan sedimen. Penentuan kadar organoklorin dilakukan dengan beberapa tahapan dimulai dari pengambilan sampel, preparasi awal, ekstraksi, pencucian, hingga pengukuran dengan menggunakan kromatografi gas dengan detektor spektrometri massa (GC-MS) atau kromatografi gas dengan detektor penangkap elektron (GC-ECD).

RSNI Kualitas tanah – Penentuan kadar pestisida organoklorin menggunakan kromatografi gas dengan deteksi selektif massa (GC-MS) dan kromatografi gas dengan deteksi penangkapan elektron (GC-ECD) telah dibahas melalui rapat teknis pada tanggal 31 Juli 2024 dan disepakati dalam rapat konsensus pada tanggal 28 Agustus 2024 yang dihadiri oleh *stakeholder* terkait yaitu perwakilan dari pemerintah, pelaku usaha, konsumen, dan pakar. RSNI Kualitas tanah – Penentuan kadar pestisida organoklorin menggunakan kromatografi gas dengan deteksi selektif massa (GC-MS) dan kromatografi gas dengan deteksi penangkapan elektron (GC-ECD) telah disampaikan ke BSN dan telah melalui tahap jajak pendapat dengan periode waktu dari 19 September-3 Oktober 2024. Pada tanggal 29 Oktober 2024, BSN telah menetapkan RSNI ini menjadi SNI ISO 23646:2022 tentang Kualitas tanah – Penentuan kadar pestisida organoklorin menggunakan kromatografi gas dengan deteksi selektif massa (GC-MS) dan kromatografi gas dengan deteksi penangkapan elektron (GC-ECD) melalui Surat Keputusan Kepala BSN Nomor 509/KEP/BSN/10/2024.



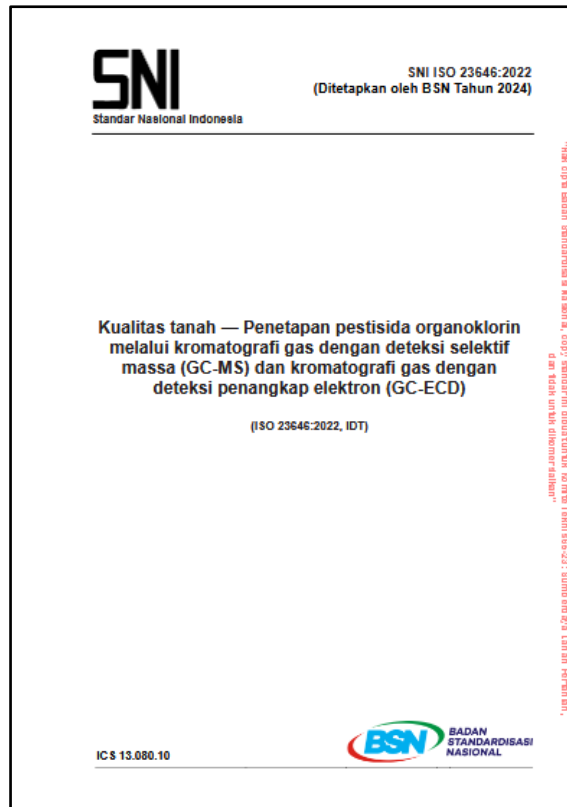
Gambar 16. Rapat Teknis 1 RSNi1 Kualitas Tanah – Penentuan Kadar Pestisida Organoklorin Menggunakan Kromatografi Gas Dengan Deteksi Selektif Massa (GC-MS) dan Kromatografi Gas Dengan Deteksi Penangkapan Elektron (GC-ECD)



Gambar 17. Rapat Konsensus RSNi3 Kualitas Tanah – Penentuan Kadar Pestisida Organoklorin Menggunakan Kromatografi Gas Dengan Deteksi Selektif Massa (GC-MS) dan Kromatografi Gas Dengan Deteksi Penangkapan Elektron (GC-ECD)



Gambar 18. Pelaksanaan jajak pendapat RSNi3 "Kualitas Tanah – Penentuan Kadar Pestisida Organoklorin Menggunakan Kromatografi Gas Dengan Deteksi Selektif Massa (GC-MS) dan Kromatografi Gas Dengan Deteksi Penangkapan Elektron (GC-ECD)"



Gambar 19. Dokumen SNI ISO 23646:2022 tentang Kualitas Tanah – Penentuan Kadar Pestisida Organoklorin Menggunakan Kromatografi Gas Dengan Deteksi Selektif Massa (GC-MS) dan Kromatografi Gas Dengan Deteksi Penangkapan Elektron (GC-ECD)

3. RSNI Batas maksimum residu pestisida pada komoditas pertanian asal tumbuhan

RSNI Batas maksimum residu pestisida pada komoditas pertanian asal tumbuhan disusun dengan jalur pengembangan mandiri dan merupakan revisi dari SNI 7313:2008 Batas maksimum residu pestisida pada hasil pertanian. Konsep RSNI disusun oleh tim konseptor yang berasal dari BPSI Lingkungan Pertanian, BBPSI Pascapanen, BBPP Biniang, dan Departemen Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Standar ini menetapkan batas maksimum residu pestisida pada komoditas pertanian asal tumbuhan, cara pengambilan contoh, dan cara uji. Perubahan yang terjadi pada standar ini adalah: (1) Perubahan judul, ruang lingkup, acuan normatif, istilah dan definisi, terjemahan nama komoditas, cara pengambilan contoh, dan cara uji, (2) Penambahan bahan aktif dan komoditas pada komoditas pertanian asal tumbuhan, (3) Penghapusan komoditas pertanian asal hewan, dan (4) Penyesuaian nilai BMR mengacu pada standar regional dan internasional.

RSNI Batas maksimum residu pestisida pada komoditas pertanian asal tumbuhan telah dibahas dalam dua kali rapat teknis yaitu pada tanggal 6 Agustus 2024 dan 13 September 2024. RSNI Batas maksimum residu pestisida pada komoditas pertanian asal tumbuhan telah

dibahas dalam rapat konsensus pada tanggal 3 Oktober 2024 dengan dihadiri oleh *stakeholder* terkait yaitu perwakilan dari pemerintah, pelaku usaha, konsumen, dan pakar. RSNi Batas maksimum residu pestisida pada komoditas pertanian asal tumbuhan telah disampaikan ke BSN dan telah melalui tahap jajak pendapat dengan periode waktu dari 24 Oktober-22 November 2024. Pada tanggal 12 Desember 2024, BSN telah menetapkan RSNi ini menjadi SNI 7313:2024 tentang Batas maksimum residu pestisida pada komoditas pertanian asal tumbuhan melalui Surat Keputusan Kepala BSN Nomor 648/KEP/BSN/12/2024.



Gambar 20. Rapat Teknis 1 RSNi1 Batas Maksimum Residu Pestisida Pada Komoditas Pertanian Asal Tumbuhan



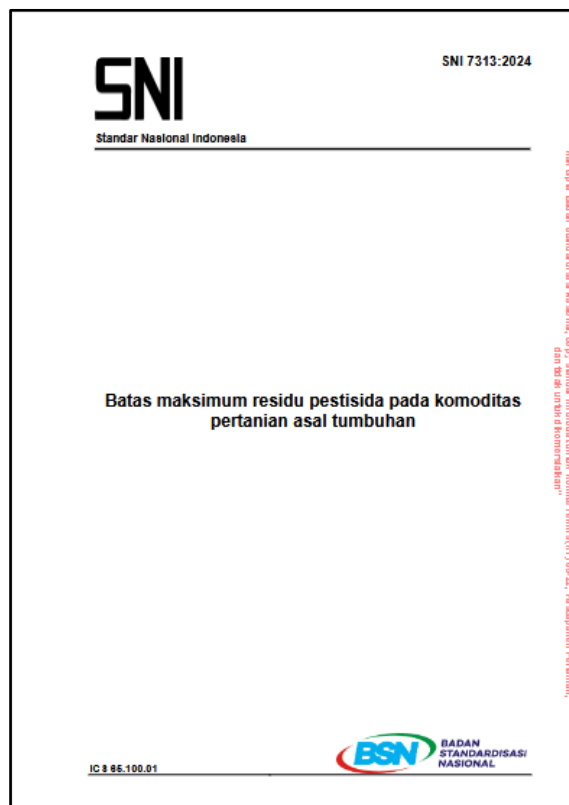
Gambar 21. Rapat Teknis 2 RSNi2 Batas Maksimum Residu Pestisida Pada Komoditas Pertanian Asal Tumbuhan



Gambar 22. Rapat Konsensus RSNi3 Batas Maksimum Residu Pestisida Pada Komoditas Pertanian Asal Tumbuhan



Gambar 23. Pelaksanaan jajak pendapat RSNI3 Batas Maksimum Residu Pestisida Pada Komoditas Pertanian Asal Tumbuhan



Gambar 24. Dokumen SNI 7313:2024 tentang Batas Maksimum Residu Pestisida Pada Komoditas Pertanian Asal Tumbuhan

5.3 Seminar Pelaporan Tengah Tahun

Seminar Pelaporan Tengah Tahun 2024 telah dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2024 di Gedung Agrostandar. Pelaksanaan seminar ini bertujuan untuk mengetahui progres capaian kinerja Semester I (periode Januari-Juni) Tahun 2024. Peserta seminar pelaporan tengah tahun yaitu sebanyak 50 orang, meliputi Kepala Balai, Kasubag TU, Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi, Ketua Tim Kerja Layanan Pengujian, narasumber (BRIN dan Laboratorium Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman wilayah Pati), pejabat fungsional ahli dan terampil, calon pejabat pejabat fungsional serta tim administrasi.

Seminar pelaporan tengah tahun ini menyajikan 17 (tujuh belas) tayangan yang diplenokan sebanyak 6 (enam) sesi yang terdiri dari Kerjasama dan Hibah, Tata Usaha, Program, Anggaran dan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi, Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Standar (RSNI/PNPS), Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian, dan Program Strategis Kementerian Pertanian. Seminar ini merupakan salah satu wadah untuk menyampaikan progres kegiatan, sekaligus monitoring dan evaluasi kegiatan yang ada di BPSI Lingkungan Pertanian sebagai upaya mewujudkan perbaikan-perbaikan kegiatan balai yang sedang berjalan.



Gambar 25. Pelaksanaan Seminar Pelaporan Tengah Tahun

5.4 Peningkatan Kualitas Laboratorium BPSI Lingkungan Pertanian

1. Perpanjangan Status Akreditasi SNI ISO 17025:2017

Akreditasi laboratorium sangat penting karena memberikan jaminan bahwa laboratorium memiliki kompetensi untuk melakukan pengujian dengan hasil yang andal dan sesuai standar internasional. Laboratorium BPSI Lingkungan Pertanian (LP 556 IDN) telah terakreditasi KAN ISO/SNI 17025:2017 sejak bulan Desember 2011 dan telah melewati 2 kali masa akreditasi yaitu tahun 2015 dan tahun 2019. Status akreditasi Laboratorium BPSI

Lingkungan Pertanian akan berakhir pada tanggal 30 September 2024. Menindaklanjuti hal tersebut maka pada tanggal 26 Maret 2024 Laboratorium BPSI Lingkungan Pertanian mengajukan permohonan perpanjangan status akreditasi ke Kanmis. Pada Re-Asesmen tahun 2024 ini terdapat 46 parameter uji yang akan diajukan masuk dalam ruang lingkup akreditasi. Selain itu, terdapat beberapa perubahan terkait ruang lingkup akreditasi laboratorium dari yang terdaftar sebelumnya. Perubahan kategori bahan atau produk yang diuji pada re-asesmen laboratorium disajikan pada Tabel 6.

Tabel 16. Perubahan Kategori Bahan atau Produk yang Diuji Pada Re-Asesmen Laboratorium

No.	Ruang Lingkup Akreditasi Sebelum Re-Asesmen	Ruang Lingkup Akreditasi Setelah Re-Asesmen
1	Air irigasi	Air
2	Tanaman pangan (padi/beras)	Produk pertanian yang mengandung kadar pati tinggi (beras/padi, jagung, sorgum, kacang-kacangan dalam bentuk biji-bijian/belih/bulir)
3	Tanaman Hortikultura (kubis, kacang panjang, sawi, apel, melon, cabai, bawang merah, kentang)	Produk pertanian yang mengandung kadar air tinggi (apel, pir, bawang merah, melon, tomat, cabai, kentang, wortel, kubis) Produk pertanian yang mengandung kadar asam tinggi (jeruk, jeruk bali, lemon, jeruk nipis)
4	-	Produk pestisida formulasi

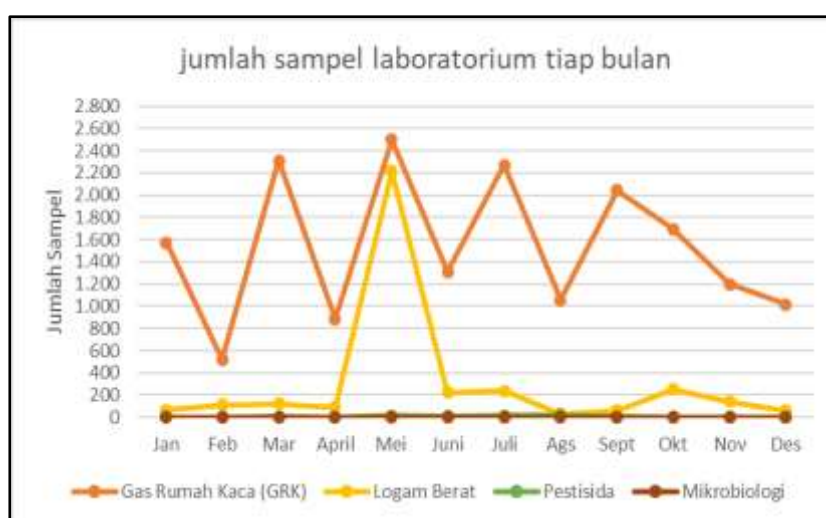
Setelah melalui serangkaian proses dalam pelaksanaan re-asesmen, pada 23 Oktober 2024 sertifikat SNI ISO/IEC 17025:2017 BPSI Lingkungan Pertanian telah terbit dan berlaku sampai dengan 30 September 2029. Dengan terbitnya sertifikat SNI ISO/IEC 17025:2017 menunjukkan komitmen laboratorium pengujian BPSI Lingkungan Pertanian untuk menerapkan Good Laboratory Practice (GLP) atau praktek berlaboratorium yang baik dan benar.

2. Penerimaan Sampel Pengujian Laboratorium

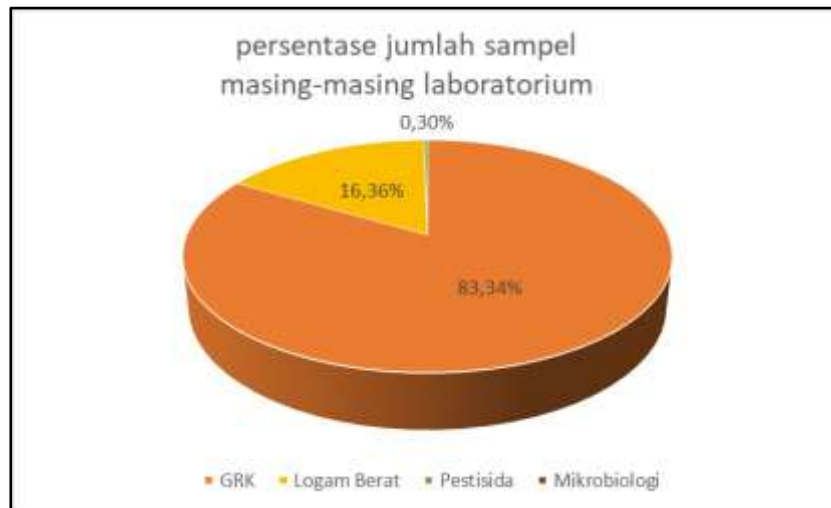
Pada tahun 2024, jumlah sampel yang diujikan di Laboratorium BPSI Lingkungan Pertanian sebanyak 22.054 sampel. Sampel paling banyak diujikan pada laboratorium gas rumah kaca sebanyak 18.380 sampel (83,34%). Laboratorium mikrobiologi sampai dengan bulan Desember 2024 belum menerima sampel eksternal, kegiatan yang dilakukan adalah perbanyakan/peremajaan koleksi bakteri. Jumlah sampel eksternal terbanyak yang diterima laboratorium adalah pada bulan Mei sebanyak 4.726 sampel. Jumlah sampel untuk masing-masing laboratorium disajikan pada Tabel 12.

Tabel 17. Jumlah Sampel Laboratorium BPSI Lingkungan Pertanian

No.	Bulan	Jumlah Sampel				Jumlah
		Laboratorium GRK	Laboratorium Logam Berat	Laboratorium Pestisida	Laboratorium Mikrobiologi	
1	Januari	1.574	67	1	0	1.642
2	Februari	521	109	0	0	630
3	Maret	2.312	121	3	0	2.436
4	April	885	90	0	0	975
5	Mei	2.497	2.215	14	0	4.726
6	Juni	1.308	224	9	0	1.541
7	Juli	2.273	239	16	0	2.528
8	Agustus	1.056	31	18	0	1.105
9	September	2.046	61	3	0	2.119
10	Oktober	1.693	251	1	0	1.945
11	November	1.199	142	0	0	1.341
12	Desember	1.016	59	0	0	1.075
Total		18.380	3.609	65	0	22.054

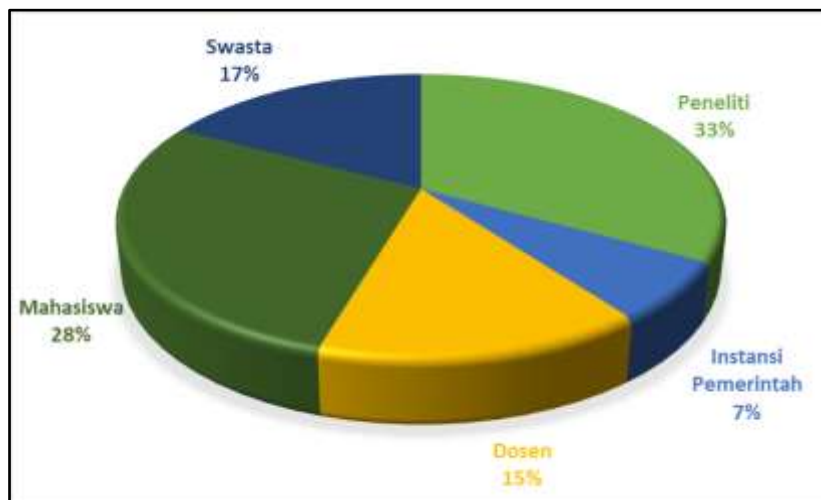


Gambar 28. Jumlah Sampel Laboratorium BPSI Lingkungan Pertanian Tahun 2024



Gambar 29. Persentase Jumlah Sampel Laboratorium BPSI Lingkungan Pertanian

Pelanggan Laboratorium BPSI Lingkungan Pertanian tahun 2024 total berjumlah 284 orang yang berasal dari berbagai daerah dan latar belakang. Sebagian besar merupakan pelanggan dari area Jawa Tengah dan Yogyakarta, sisanya berasal dari luar Pulau Jawa seperti Kalimantan. Pelanggan paling banyak adalah peneliti sebanyak 94 orang, mahasiswa sebanyak 80 orang, pelanggan lainnya adalah swasta sebanyak 49 orang, dosen sebanyak 42 orang, dan instansi pemerintah sebanyak 19 orang.



Gambar 30. Komposisi Pelanggan Laboratorium BPSI Lingkungan Pertanian

3. Peningkatan Kapasitas SDM Laboratorium

Dalam upaya meningkatkan kapasitas dan wawasan SDM, Laboratorium BPSI Lingkungan Pertanian telah melakukan beberapa kegiatan *Inhouse Training*, *Workshop*, dan Bimbingan Teknis. Adapun *Inhouse Training*, *Workshop*, dan Bimbingan teknis yang sudah dilakukan pada tahun 2024 disajikan pada Tabel 16.

Tabel 18. Daftar *Inhouse Training, Workshop*, dan Bimbingan Teknis

No.	Pelatihan	Narasumber	Pelaksanaan	Peserta
1	Workshop Analisa Merkuri Menggunakan Metode USEPA 7473	PT. Lab Sistemika Indonesia	16 Januari 2024	Analisis Laboratorium
2	Refreshment Implementasi SNI ISO/IEC 17025:2017	Asep Kurnia, S.P., M.Eng. (BRIN)	29 Juli 2024	Analisis Laboratorium
3	Jaminan Mutu Pengujian (Validasi Verifikasi Metode dan Perhitungan Evaluasi Ketidakpastian Pengujian)	Asep Kurnia, S.P., M.Eng. (BRIN)	30 Juli 2024	Analisis Laboratorium
4	Implementasi Good Laboratory Practices	Asep Kurnia, S.P., M.Eng. (BRIN)	30 Juli 2024	Analisis Laboratorium
5	Prinsip Dasar Instrumen Laboratorium	Asep Kurnia, S.P., M.Eng. (BRIN)	30 Juli 2024	Analisis Laboratorium
6	Bimbingan Teknis Uji Profisiensi Residu Pestisida Pada Biji Kopi Tahun 2024	Kementerian Perdagangan	26 Agustus 2024	1. Ria Fauriah 2. Afrida Fakhiatul M.
7	FGD Uji Profisiensi Residu Pestisida pada Biji Kopi Tahun 2024	Kementerian Perdagangan	26-27 September 2024	Afrida Fakhiatul M.
8	Validasi Metode QuEChERS untuk Pengujian Residu Pestisida pada Komoditas Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	1. Fitra Purnariyanto 2. Ria Fauriah	5-7 November 2024	Analisis Laboratorium Pestisida dan Logam Berat



Gambar 31. Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Laboratorium BPSI Lingkungan Pertanian

4. Uji Profisiensi

a. Uji Profisiensi Tanah, Tanaman, dan Pupuk Organik

Program uji profisiensi untuk komoditas tanah, tanaman, dan pupuk organik diselenggarakan oleh BPSI Tanah dan Pupuk. Program ini dilakukan pada bulan September Tahun 2023, akan tetapi laporan hasil uji profisiensi baru diselesaikan pada bulan agustus tahun 2024. Program uji profisiensi antar laboratorium ini merupakan salah satu instrumen yang sangat penting sebagai sarana jaminan mutu eksternal (*external quality control*) bagi laboratorium pengujian sesuai dengan persyaratan standard SNI ISO/IEC 17025:2017. Dengan mengikuti program uji banding, laboratorium dapat melakukan evaluasi kinerja pengujian yang dilakukan dalam rangka melakukan peningkatan secara berkesinambungan (*continuous improvement*) untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. Pada

program ini, Laboratorium BPSI Lingkungan Pertanian berpartisipasi pada pengujian sampel tanah, tanaman, dan pupuk organik.

Tabel 19. Hasil Uji Profisiensi Tanah, Tanaman, dan Pupuk Organik

No.	Komoditas	Parameter	Z-Score	
1	Tanah	pH ekstrak KCl 1 N	0,21	Ok
		C-Organik	-0,69	Ok
		Nitrogen	-2,04	\$
2	Tanaman	Nitrogen	-0,66	Ok
		Fosfor	9,89	\$\$
		Kalium	-0,39	Ok
3	Pupuk Organik	pH ekstrak H ₂ O	-1,57	Ok
		C-Organik	-1,93	Ok
		Nitrogen	-1,56	Ok

Berdasarkan penilaian Z-Score, parameter uji Nitrogen tanah tergolong meragukan (\$) dan parameter uji fosfor pada tanaman tergolong kurang memuaskan (\$\$). Dari hasil ini, maka Laboratorium BPSI Lingkungan Pertanian diminta untuk menindaklanjuti dengan melakukan investigasi akar masalah dan melakukan tindakan perbaikan terhadap parameter uji nitrogen tanah dan fosfor pada tanaman.

b. Uji Profisiensi Residu Pestisida Pada Biji Kopi

Kegiatan uji profisiensi ini diselenggarakan oleh Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan. Pengujian contoh uji profisiensi ini berlangsung pada 2-13 September 2024. Pengujian residu pestisida pada biji kopi hingga saat ini tercatat sebagai pengujian yang sulit untuk dilakukan karena biji kopi termasuk ke dalam matriks sampel unik dan kompleks berdasarkan regulasi yang dikeluarkan oleh Uni Eropa dalam dokumen Nomor SANTE/11312/2021. Terdapat 3 (tiga) parameter senyawa residu pestisida yang diikuti oleh laboratorium BPSI Lingkungan Pertanian dalam program uji profisiensi ini yaitu Isopocarb, Chlorphyriphos, dan Diazinon.

Tabel 20. Hasil asesmen Z/Z'-Score

No.	Bahan aktif	Hasil Z/Z'-Score
1	Isopocarb	<i>Satisfactory</i>
2	Chlorphyriphos	<i>Satisfactory</i>
3	Diazinon	<i>Unsatisfactory</i>

Berdasarkan hasil tersebut, maka Laboratorium BPSI Lingkungan Pertanian diminta untuk menindaklanjuti dengan melakukan investigasi akar masalah dan melakukan tindakan perbaikan terhadap parameter diazinon. Dalam melakukan investigasi tindak lanjut hasil uji profisiensi, terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan oleh laboratorium dalam melakukan investigasi tindak lanjut hasil uji profisiensi kategori *Unsatisfactory* yaitu:

- a) Walaupun belum terakreditasi, namun metode uji yang digunakan dipastikan telah divalidasi dan nilai *Limit of Quantification* (LoQ) yang diperoleh telah dibuktikan presisi dan akurasi melalui pengecekan *spiking* pada level LoQ tersebut.
- b) Laboratorium yang melaporkan jaminan mutu internal % *recovery* di luar rentang keberterimaan, perlu melakukan investigasi terkait efektivitas ekstraksi metode uji. Pelaporan hasil uji dengan mengoreksi terhadap % *recovery* juga perlu dipertimbangkan.
- c) Sebelum melakukan analisis, ada baiknya laboratorium peserta melakukan pengecekan terhadap peralatan baik instrument analisis maupun peralatan pendukung pengujian yang dapat berpengaruh terhadap akurasi dan presisi hasil uji.

5. Kalibrasi

Sebagai laboratorium yang telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 dan untuk memberikan jaminan mutu hasil pengujian, maka penting untuk melakukan kalibrasi alat. Kalibrasi alat ini untuk memastikan bahwa hasil pengukuran yang dilakukan oleh alat tersebut sesuai dengan nilai yang sebenarnya, sehingga data yang diperoleh valid dan dapat dipercaya. BPSI Lingkungan Pertanian memiliki program kalibrasi alat yang dilakukan secara berkala minimal 1 tahun sekali. Dengan melakukan kalibrasi secara teratur, laboratorium dapat mempertahankan kualitas hasil kerja, meningkatkan kepercayaan pelanggan, dan memenuhi persyaratan regulasi yang berlaku.

Tabel 21. Daftar Kalibrasi Alat Laboratorium BPSI Lingkungan Pertanian

No.	Nama Alat	Spesifikasi	Jumlah
1	Timbangan Analitik	Ohaus	3
2	Timbangan Analitik	Fujitsu	1
3	Multimeter (pH dan EC)	-	1
4	pH meter	Ohaus	1
5	Spektrofotometer	Cary 50	1
6	Oven	Memmert	3
7	Pipet Ukur	2 ml/sibata	1
8	Pipet Ukur	1 ml/Socorex	1
9	Pipet Ukur	10 ml/Iwaki	1
10	Pipet Ukur	5 ml/Hokkai	1

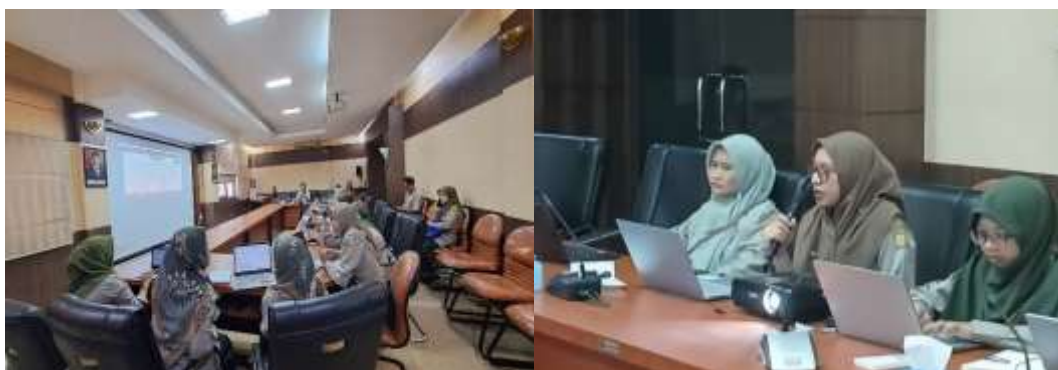
No.	Nama Alat	Spesifikasi	Jumlah
11	Pipet volume	5 ml viditec	1
12	Pipet volume	10 ml/Iwaki	1
13	Buret	25 ml/Iwaki	1
14	Tabung Reaksi Kaca	10 ml/pyrex	1
15	Labu ukur	10 ml/pyrex	1
16	Labu ukur	50 ml/Iwaki	1
17	Labu ukur	100 ml/Vidtex	1
18	Tanur	D550/600 C	1
19	Freezer Portable	0-10 ° C	1
20	Anak Timbang	F1/0,25g; 0,5 g; 1 gr; 5 gr; 10 gr; 25 gr; 100 gr	7
21	Labu Takar	10 ml	1
22	Thermometer portable		1

5.5 Pemeliharaan Sistem Mutu SNI ISO 9001:2015

Pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu (SMM) SNI ISO 9001:2015 adalah upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa organisasi tetap memenuhi persyaratan standar internasional terkait kualitas. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, meminimalkan risiko, dan mendorong perbaikan berkelanjutan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pemeliharaan SMM SNI ISO 9001:2015 di BPSI Lingkungan Pertanian selama periode tertentu. Cakupan kinerja pemeliharaan SMM SNI ISO 9001:2015 meliputi:

1. Rapat Koordinasi Tim ISO BPSI Lingkungan Pertanian

Rapat koordinasi Tim ISO Balai yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juni 2024 membahas berbagai aspek penting untuk memastikan kelancaran implementasi SNI ISO 9001:2015 di BPSI Lingkungan Pertanian. Dalam rapat ini, wakil manajemen memberikan pemaparan mengenai susunan tim yang telah disesuaikan dengan SK Balai Revisi 2. Arahan dari Kepala Balai menegaskan pentingnya profesionalisme dalam setiap komponen tim, serta kontribusi yang membangun untuk perbaikan internal dan eksternal. Pembahasan juga mencakup tindak lanjut terhadap ketidaksesuaian audit sebelumnya, termasuk revisi dokumen seperti proses bisnis, struktur organisasi, SOP, dan formulir. Penjadwalan agenda audit telah disusun secara rinci, dimulai dari tinjauan dokumen pada Juli, sosialisasi dokumen pada pertengahan Juli, internal audit pada Agustus, hingga pendaftaran asesmen di September. Rapat juga menyoroti pentingnya pelatihan bagi anggota tim baru yang belum bersertifikasi ISO dan perlunya konsistensi antara prosedur dokumen dengan kondisi aktual. Untuk isu perubahan iklim, meskipun tidak menjadi tugas pokok Balai, tim akan menyusun dokumen terkait kegiatan GRK sesuai arahan Eselon II.



Gambar 32. Rapat Koordinasi Tim ISO BPSI Lingkungan Pertanian

2. Tinjauan Dokumen

Pada kegiatan tinjauan dokumen SNI ISO 9001:2015 Balai yang dilaksanakan pada 12-13 Agustus 2024, fokus utama pembahasan mencakup peninjauan dokumen pedoman mutu Balai mulai dari pasal 1 hingga 10, serta formulir yang digunakan. Dalam sesi ini, dilakukan evaluasi terhadap proses bisnis, dimana beberapa tambahan, seperti program penyebaran informasi melalui perpustakaan, magang, dan pameran, telah diintegrasikan ke dalam aktivitas Balai. Selain itu, pembahasan juga mencakup sasaran mutu yang telah diperbarui berdasarkan rencana kinerja 2024 dan matriks program untuk 2025.

Struktur organisasi dan deskripsi tugas telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pertanian terbaru, termasuk integrasi kegiatan terkait perubahan iklim dalam sistem GRK. Beberapa revisi dilakukan pada dokumen pendukung, seperti SOP penerimaan tamu, formulir, serta penyesuaian dokumen terkait konteks organisasi. Penyesuaian ini bertujuan memastikan konsistensi dokumen dengan standar SNI ISO 9001:2015, termasuk penggunaan istilah dan format penulisan yang seragam.



Gambar 33. Kegiatan Tinjauan Dokumen SNI ISO 9001:2015 di BPSI Lingkungan Pertanian

Selain itu, dilakukan revisi terhadap formulir dan SOP terkait, termasuk penambahan kolom, pembaruan istilah, dan perbaikan format dokumen. Tim juga menekankan perlunya memperhatikan konsistensi penulisan huruf kapital, akronim, dan tata bahasa. Prosedur untuk magang, seperti kuota dan peraturan tertulis, juga dibahas untuk memberikan panduan yang

lebih jelas. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat dokumentasi dan implementasi SNI ISO 9001:2015 di Balai sesuai dengan perkembangan kebutuhan BPSI Lingkungan Pertanian.

Tabel 22. Daftar Revisi Pedoman Mutu

No.	Bagian	Revisi	No. Revisi
1	PM 0.1	Pergantian Kepala Balai	1/12 Agustus 2024
2	PM 0.4	Struktur Organisasi	1/12 Agustus 2024
3	PM 1.0	Menghapus klausul 8.3 dari pengecualian	1/12 Agustus 2024
4	PM 2.0	Penambahan acuan: Kepmentan Nomor 278/KPTS/OT.050/M/06/2023 Kepmentan Nomor 279/KPTS/OT.050/M/06/2023	1/12 Agustus 2024
5	PM 4.0	Penambahan Prosedur Mutu Layanan Humas dan Informasi	1/12 Agustus 2024
6	PM 5.0	Istilah Pimpinan Puncak menjadi Manajemen Puncak	1/12 Agustus 2024
7	PM 6.0	Penambahan Prosedur Mutu Layanan Humas dan Informasi	1/12 Agustus 2024
8	PM 7.0	1. Penambahan Prosedur Mutu Layanan Humas dan Informasi 2. Penambahan Prosedur Mutu Layanan Humas dan Informasi	1/12 Agustus 2024
9	PM 8.0	Penambahan klausul 8.3 Desain dan pengembangan produk dan jasa (standardisasi untuk menghasilkan dokumen standar lingkungan pertanian)	1/12 Agustus 2024
10	Lampiran 1 Proses Bisnis	Revisi proses bisnis pada Tim Kerja Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Lingkungan Pertanian	1/12 Agustus 2024
11	Lampiran 3	PK 2023 menjadi PK 2024	1/12 Agustus 2024

3. Sosialisasi Dokumen

Sosialisasi dokumen SNI ISO 9001:2015 tahun 2024 di BPSI Lingkungan Pertanian menyoroti pentingnya pemahaman yang konsisten seluruh pegawai mengenai jenis dokumen internal, seperti Pedoman Mutu (PM), Prosedur Mutu (PRM), Formulir Mutu (FM), dan SOP. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan keseragaman dalam penerapan sistem manajemen mutu di seluruh bagian. Beberapa revisi pada pedoman mutu, seperti profil struktur organisasi, ruang lingkup, dan proses bisnis, menunjukkan penyesuaian terhadap kebutuhan organisasi dan dinamika peraturan terkini. Pada sesi tersebut, wakil manajemen menyampaikan mengenai revisi pada dokumen prosedur mutu. Contohnya, PRM terkait audit internal kini dijadwalkan dua kali setahun untuk meningkatkan frekuensi evaluasi, dan prosedur baru diperkenalkan untuk penyebaran informasi melalui kegiatan magang, kunjungan agroeduwisata, serta pameran. Selain itu, formulir mutu juga mengalami beberapa revisi,

seperti pengajuan cuti dengan penambahan kolom persetujuan atasan, TU, dan kepala balai untuk meningkatkan akuntabilitas pegawai.

Sosialisasi ini juga memperkenalkan SOP baru yang relevan dengan kebutuhan operasional, seperti keamanan lingkungan, penerimaan tamu, barang, serta kunjungan agroeduwisata. Dengan adanya pembaruan dan penyesuaian ini, diharapkan seluruh staf dapat memahami dan menerapkan dokumen dengan konsisten, sehingga mendukung pencapaian tujuan sistem manajemen mutu serta meningkatkan efisiensi operasional BPSI Lingkungan Pertanian.



Gambar 34. Sosialisasi Dokumen SNI ISO 9001:2015 BPSI Lingkungan Pertanian

4. Audit Internal

a. Audit Internal 1

Audit internal pertama SNI ISO 9001:2015 dilaksanakan mulai 17 September hingga 7 Oktober 2024. Audit ini merupakan salah satu dari dua jadwal audit internal yang direncanakan setiap tahun, meskipun pelaksanaannya mengalami keterlambatan dari jadwal awal yang ditetapkan pada Juni. Keterlambatan ini disebabkan oleh pengelolaan jadwal yang kurang optimal, sehingga Kepala Balai menekankan perlunya penjadwalan yang lebih disiplin dan pengelolaan yang lebih baik oleh Wakil Manajemen di masa depan. Arahan Kepala Balai juga mencakup pentingnya melakukan audit kedua pada Desember sesuai dengan jadwal audit, agar ada cukup waktu untuk memperbaiki ketidaksesuaian.

Ketidaksesuaian audit mencakup beberapa ketidaksesuaian minor di berbagai bagian, seperti belum diperbaruinya dokumen kebijakan mutu, kurangnya laporan hasil survei internal, dan verifikasi yang belum rutin pada formulir pemeliharaan alat. Selain itu, penyimpanan dokumen yang belum rapi dan evaluasi pelatihan yang belum lengkap juga menjadi catatan penting. Salah satu isu utama adalah penggunaan *softcopy* dokumen yang masih disimpan di perangkat pribadi, sehingga perlu dikelola lebih baik melalui penyimpanan terpusat, seperti hard drive eksternal, untuk memastikan keberlanjutan dokumentasi.

Sebagai tindak lanjut, Kepala Balai menekankan pentingnya kesungguhan dalam proses audit serta penyimpanan hasil audit yang terorganisir. Hasil audit ini juga diharapkan menjadi dasar perbaikan berkelanjutan dalam sistem manajemen mutu, sehingga dari waktu ke waktu tidak lagi ditemukan ketidaksesuaian. Pelaksanaan audit dan kegiatan terkait lainnya, seperti surveilans, memerlukan perencanaan dan eksekusi yang lebih baik untuk menjaga kredibilitas dan efektivitas sistem manajemen mutu balai.

Tabel 23. Daftar Ketidaksesuaian Pada Audit Internal 1

No.	Bagian	Jenis Ketidaksesuaian	Jumlah	Status Tindakan Perbaikan
1	Manajemen Puncak	Minor	1	Close
2	Tata usaha	Minor	6	Close
3	Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi Lingkungan Pertanian	Minor	1	Close
4	Audit Internal	Observasi	2	Close

b. Audit Internal 2

Audit internal kedua di BPSI Lingkungan Pertanian berlangsung pada 9-18 Desember 2024. Audit ini bertujuan mengevaluasi konsistensi implementasi Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015. Hasil audit menunjukkan beberapa observasi ketidaksesuaian yang menjadi perhatian, seperti kurang konsistennya pengawasan infrastruktur, penggunaan formulir lama oleh sebagian pegawai, dan kelemahan dalam pengelolaan evaluasi pelatihan serta kebutuhan pihak berkepentingan. Beberapa ketidaksesuaian lain mencakup kurangnya SOP untuk menangani permintaan produk standar dari pihak eksternal oleh Tim Kerja Program, Evaluasi, dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi Lingkungan Pertanian, serta penggunaan daftar periksa audit internal yang belum sepenuhnya mencakup klausul 4.1 dan 4.2. Selain itu, perlunya analisis mendalam terkait akar masalah pada rencana perbaikan juga menjadi poin penting untuk meningkatkan efektivitas tindakan koreksi.

Tabel 24. Daftar Ketidaksesuaian Pada Audit Internal 2

No.	Bagian	Jenis Ketidaksesuaian	Jumlah	Status Tindakan Perbaikan
1	Wakil Manajemen	Observasi	1	Proses perbaikan
2	Tata usaha	Observasi	7	Proses perbaikan
3	Tim Kerja Program, Evaluasi dan Penyebarluasan Hasil Standardisasi Lingkungan Pertanian	Observasi	1	Proses perbaikan
4	Audit Internal	Observasi	3	Proses perbaikan

5. Tinjauan Manajemen

Tinjauan Manajemen adalah proses penyampaian laporan/informasi dari Wakil Manajemen terkait pelaksanaan dan kendala penerapan sistem manajemen mutu kepada Manajemen Puncak dan dihadiri oleh unsur manajemen lainnya. Rapat tinjauan manajemen yang dipimpin oleh Kepala Balai pada 17 Oktober 2024 menekankan evaluasi menyeluruh terhadap Sistem Manajemen Mutu (SMM) SNI ISO 9001:2015. Agenda rapat mencakup beberapa hal berikut: (a) Evaluasi tinjauan manajemen sebelumnya, (b) Isu internal dan eksternal serta identifikasi risiko dan peluang, (c) Kinerja sistem manajemen mutu meliputi kepuasan pelanggan, pencapaian sasaran mutu, kinerja proses, dan tindakan korektif, (d) Audit internal, (e) Kinerja penyedia eksternal, (f) Kecukupan sumber daya, (g) Efektivitas tindakan pada risiko dan peluang, (h) Peluang peningkatan, dan (i) Keperluan perubahan.

Evaluasi terhadap tinjauan sebelumnya menunjukkan bahwa tindakan perbaikan telah dilakukan dengan baik, termasuk penyelesaian ketidaksesuaian minor dari audit internal sebelumnya. Capaian IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) semester I tahun 2024 sebesar 89,39 mengindikasikan layanan yang sangat baik. Namun, beberapa kendala seperti revisi pagu PNBPN dan blokir anggaran masih dalam proses penyelesaian. Evaluasi menunjukkan progres yang signifikan, meskipun masih terdapat beberapa target yang belum sepenuhnya tercapai, seperti digitalisasi pelayanan yang sedang dikembangkan dengan target akhir tahun 2024.

Identifikasi isu internal dan eksternal telah dilakukan dengan menganalisis risiko dan peluang. Isu internal mencakup keterbatasan SDM dan kebutuhan peningkatan kualitas sarana dan prasarana, sementara isu eksternal seperti perubahan organisasi dan iklim diantisipasi melalui langkah strategis. Secara keseluruhan, sistem manajemen mutu menunjukkan kinerja positif, dengan kepuasan pelanggan yang terus meningkat, proses kerja yang sesuai dengan perencanaan, dan tindakan korektif yang efektif. Audit internal terakhir mencatat 11 ketidaksesuaian (9 minor dan 2 observasi) yang seluruhnya telah ditindaklanjuti, sehingga statusnya dinyatakan *close*.

Evaluasi terhadap penyedia eksternal menunjukkan performa yang memuaskan, dengan beberapa penyedia yang telah disetujui. Kecukupan sumber daya masih menjadi tantangan, terutama terkait jumlah dan kualitas SDM untuk mendukung tugas pokok dan fungsi pasca-reorganisasi. Tindakan pada risiko dan peluang dinilai efektif, tetapi memerlukan peningkatan dalam penyebaran hasil riset dan pengembangan jejaring. Beberapa peluang peningkatan, seperti digitalisasi layanan dan pengembangan fasilitas baru seperti ruang PPID dan poliklinik, masih dalam proses penyelesaian, dengan target *close* pada akhir 2024.



Gambar 35. Rapat Tinjauan Manajemen BPSI Lingkungan Pertanian

6. **Audit *Surveillance* 1**

Audit *Surveillance* 1 merupakan audit pemantauan yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi independen terhadap organisasi yang telah bersertifikat SNI ISO 9001:2015. Audit ini dilakukan untuk memastikan bahwa organisasi masih berhak menyandang sertifikat ISO dan konsisten dalam menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM). Audit *Surveillance* 1 dilakukan oleh lembaga sertifikasi PT. Mutu Agung Lestari pada 28-29 November 2024 di BPSI Lingkungan Pertanian bertujuan memastikan keberlanjutan penerapan SNI ISO 9001:2015. Dalam pembukaan, Kepala Balai menekankan pentingnya audit ini sebagai sarana peningkatan manajemen balai, bukan hanya untuk memenuhi persyaratan sertifikasi. Pelaksanaan audit mencakup wawancara dan verifikasi dokumen dengan berbagai unit kerja, seperti manajemen puncak, tim kerja, layanan laboratorium, dan tata usaha, berdasarkan klausul yang relevan dalam standar ISO.

Hasil audit mencatat beberapa ketidaksesuaian penting, termasuk perlunya perbaikan dalam pengelolaan risiko dan peluang serta evaluasi kinerja penyedia eksternal. Auditor juga menyoroti perlunya penyusunan SOP untuk evaluasi penyedia jasa dan penyesuaian form perawatan kendaraan agar lebih terstruktur. Untuk layanan laboratorium, pengukuran waktu pelayanan dan penanganan keluhan pelanggan menjadi fokus perhatian. Selain itu, unit kerja terkait pengadaan barang dan jasa mendapatkan rekomendasi untuk memperbaiki evaluasi kinerja penyedia agar lebih sistematis.

Pada *Closing meeting* disimpulkan bahwa audit berjalan sesuai rencana dan memberikan gambaran menyeluruh terhadap kinerja Balai. Sebagian besar ketidaksesuaian telah ditindaklanjuti, dan sisanya dalam proses penyelesaian dengan target close pada akhir 2024. Audit ini memberikan panduan yang jelas untuk peningkatan berkelanjutan, memastikan bahwa Balai tetap memenuhi standar SNI ISO 9001:2015 dan meningkatkan efisiensi serta kualitas layanan. Kesimpulan dari Audit *Surveillance* 1 yaitu BPSI Lingkungan Pertanian direkomendasikan mendapatkan/mempertahankan/memperbarui sertifikat.

Tabel 25. Ketidaksesuaian dan Peluang Peningkatan Ketidaksesuaian

No.	Bagian	Uraian Ketidaksesuaian	Peringkat
1	Manajemen	a. Evaluasi Risiko dan Peluang sudah dilakukan, disarankan agar informasi hasil evaluasi (pada kolom keefektifan) menerangkan apakah risiko dapat dihindari/peluang dapat diraih/jika gagal dapat direncanakan tindaklanjutnya b. Kolom kapan dipantau dan kapan dievaluasi sebaiknya berupa waktu yang lebih spesifik (misal: bulan dan tahun) c. Perlu dilengkapi dengan waktu update/waktu evaluasi.	Peluang peningkatan
2	Audit Internal	a. Pemahaman klausul dapat ditingkatkan b. Saat memverifikasi tindakan perbaikan, auditor perlu memperhatikan kesesuaian analisa masalah, tindakan koreksi, dan tindakan korektif c. Waktu untuk memverifikasi efektivitas tindakan perbaikan sebaiknya disesuaikan dengan waktu yang dibutuhkan untuk melihat hasilnya d. Istilah dalam menindaklanjuti ketidaksesuaian dapat disesuaikan dengan analisa masalah, tindakan koreksi, dan tindakan korektif.	Peluang peningkatan
3	Tata Usaha: Penyediaan barang eksternal	Organisasi telah menetapkan dan menerapkan kriteria untuk mengevaluasi, memilih, memantau kinerja dan mengevaluasi ulang penyedia eksternal namun organisasi perlu menetapkan kapan evaluasi akan dilakukan.	Peluang peningkatan
4	Tim Kerja Layanan Pengujian dan Penilaian Kesesuaian Lingkungan Petanian: realisasi layanan pengujian dan penilaian kesesuaian	Organisasi perlu mempertimbangkan untuk mengukur, menganalisis, dan mengevaluasi ketepatan waktu layanan lab sesuai dengan standar waktu layanan yang disepakati.	Peluang peningkatan



Gambar 36. Audit Surveillance 1 BPSI Lingkungan Pertanian



Gambar 37. Sertifikat SNI ISO 9001:2015 BPSI Lingkungan Pertanian

5.6 Keterbukaan Informasi Publik

Layanan Informasi Publik Kementerian Pertanian merupakan wujud implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Badan Publik. Secara komprehensif Undang-Undang ini mengatur kewajiban Badan/Pejabat Publik dan Lembaga Masyarakat/Badan Publik lainnya untuk bisa memberikan pelayanan informasi yang terbuka, partisipatif dan bertanggungjawab kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 telah diterjemahkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian. Dalam Peraturan Menteri Pertanian tersebut telah disebutkan tentang tugas dan tanggung jawab dari masing-masing PPID, selanjutnya pada tahun 2016, telah disempurnakan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian. Penyempurnaan tersebut dilakukan untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi yang dimanfaatkan untuk memaksimalkan proses pengelolaan maupun pelayanan informasi publik. Kegiatan layanan humas dan informasi publik BPSI Lingkungan Pertanian memiliki tujuan untuk : (1) Memberikan standar layanan sebagai badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik dan (2) Meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik termasuk BPSI Lingkungan Pertanian untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas.

Era keterbukaan informasi masih terus didengungkan setiap badan publik. Hal ini dilatar belakangi oleh tuntutan akan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik yang mewajibkan setiap badan publik untuk melakukan pelayanan informasi publik. Pelayanan informasi publik adalah suatu usaha yang dilakukan oleh suatu Badan Publik untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat mengenai Badan Publik tersebut. Untuk terlaksananya penyebaran dan pelayanan informasi publik maka setiap Badan Publik wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang mana tim inilah yang akan berperan didalam proses penyebaran dan pemenuhan informasi kepada masyarakat.

Sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, Tim PPID BPSI Lingkungan Pertanian melakukan studi banding di PPID Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang (Polbangtan Yoma) dan Balai Besar Veteriner Wates (BBVet Wates). Dua instansi ini menjadi tujuan studi banding tim PPID BPSI Lingkungan Pertanian karena Polbangtan Yoma sebelumnya telah mendapatkan Peringkat I Predikat Informatif Kategori

Eselon II Kementerian Pertanian Tahun 2023 dan untuk Polbangtan Yoma yang telah mendapatkan kategori informatif dan telah dianugerahkan predikat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2023. Kegiatan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan semangat Tim PPID BPSI Lingkungan Pertanian dalam pengelolaan PPID serta dapat membawa BPSI Lingkungan Pertanian menjadi UPT dengan predikat Informatif.



Gambar 38. Studi Banding Tim PPID BPSI Lingkungan Pertanian ke Polbangtan Yoma dan BBVet Wates

Pada penilaian keterbukaan informasi publik tahun 2024, BPSI Lingkungan Pertanian dianugerahi penghargaan sebagai salah satu unit kerja Eselon III dengan predikat Informatif dan Petugas PPID Terbaik 2024. Hal ini merupakan salah satu pencapaian BPSI Lingkungan Pertanian karena pada tahun 2023, BPSI Lingkungan Pertanian masih mendapatkan predikat Cukup Informatif. Penghargaan ini menjadi bukti komitmen BPSI Lingkungan Pertanian dalam pelayanan informasi publik yang prima. Sebelumnya BPSI Lingkungan Pertanian telah melalui beberapa tahap penilaian Keterbukaan Informasi Publik yang diikuti oleh 120 Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis yaitu tahap SAQ, visitasi dan wawancara langsung kepada Kepala UK/UPT dengan Tim Penilai yang berasal dari Komisi Informasi Pusat, Pengamat Politik, Akademisi dan Penggiat Informasi Publik. Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Publik BPSI Lingkungan Pertanian disajikan pada Tabel 21.

Tabel 26. Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Publik BPSI Lingkungan Pertanian

Nilai SAQ	Nilai Web	Nilai Tahap I	Nilai Wawancara Pimpinan	Nilai Inovasi Pelayanan Informasi	Nilai Validasi	Nilai Tahap II	Total
96	94	95,6	78,28	82,5	100	81,72	90,05



Gambar 39. Predikat Informatif dan Petugas Terbaik PPID Tahun 2024

5.7 Pelaksanaan Pengelolaan Program Dukungan Manajemen

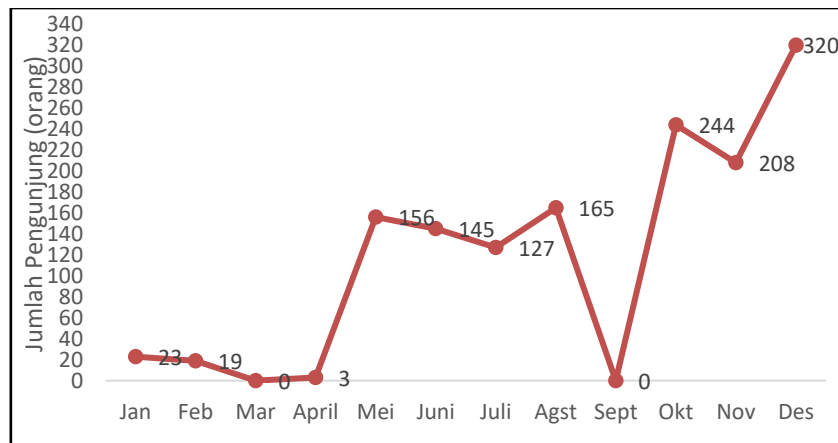
BPSI Lingkungan Pertanian meraih dua penghargaan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pati yaitu Satker Terbaik III Penilaian Indikator Kinerja IKPA Kategori Pagu Sedang dan Satker Terbaik III Penilaian Pelaksanaan Rekonsiliasi Penyampaian dan Kualitas Data Laporan Keuangan periode Semester I Tahun 2024. Penghargaan ini disampaikan dalam kegiatan Press Release APBN dan EPA, Forum Konsultasi Publik (FKP), Mou Pembentukan *Island Of Integrity* (IoI), serta Apresiasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan Satker. Penghargaan ini merupakan apresiasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan ZI, dan peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran serta laporan satker lingkup KPPN Pati. KPPN Pati mengapresiasi para pengelola anggaran/APBN Satker lingkup wilayah kerja KPPN Pati yang telah melaksanakan pengelolaan APBN Semester I tahun 2024 dengan baik, lancar dan optimal meskipun ada beberapa Satker dengan kendala masih ada pagu blokir.



Gambar 40. Satker Terbaik III Penilaian Indikator Kinerja IKPA Kategori Pagu Sedang dan Penilaian Pelaksanaan Rekonsiliasi Penyampaian dan Kualitas Data Laporan Keuangan Semester I

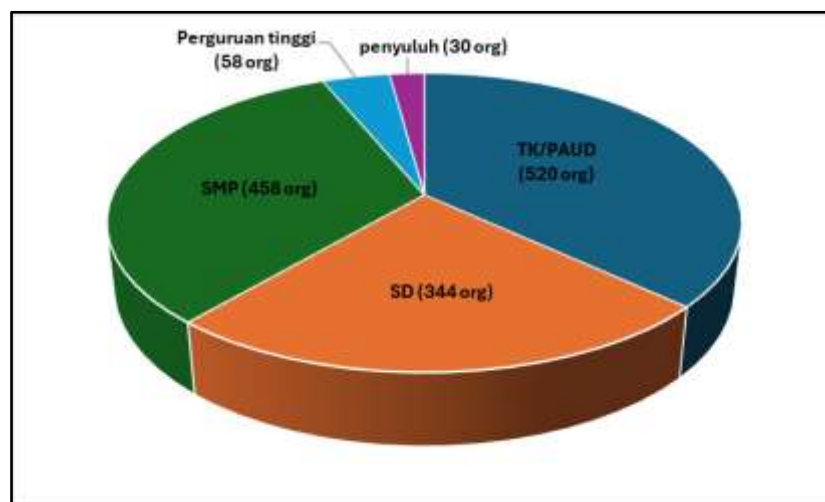
5.8 Kunjungan Tamu

Pada tahun 2024, BPSI Lingkungan Pertanian telah melayani kunjungan tamu (agroeduwisata, studi banding, dll) sebanyak 1.410 orang. Permohonan pelayanan kunjungan tamu disampaikan baik dari akademisi, penyuluh, siswa/siswi SMP, SD, TK, dan PAUD. Adapun kegiatan kunjungan terdiri dari materi ruangan dan atau materi lapang. Permintaan materi ruangan rata-rata terkait pertanian ramah lingkungan dan untuk materi lapang berupa praktek pembuatan produk ramah lingkungan (kompos, biochar, pestisida nabati) dan tanam pindah.



Gambar 41. Jumlah Kunjungan Tamu BPSI Lingkungan Pertanian

Kunjungan terbanyak terdapat pada bulan Desember yaitu sebanyak 320 orang, sedangkan pada bulan Maret dan September tidak terdapat kunjungan di BPSI Lingkungan Pertanian. Pengunjung di BPSI Lingkungan Pertanian didominasi oleh anak-anak sekolah yaitu TK, PAUD, SD, dan SMP. BPSI Lingkungan Pertanian merupakan salah satu lokasi tujuan favorit untuk kunjungan agroeduwisata bagi siswa/siswi sekolah yang berada di areal sekitar Pati. Untuk pengunjung yang berasal dari perguruan tinggi dan penyuluh umumnya berasal dari Kab. Pati, Kab Kudus, Kota Semarang, dan Kab. Kendal.



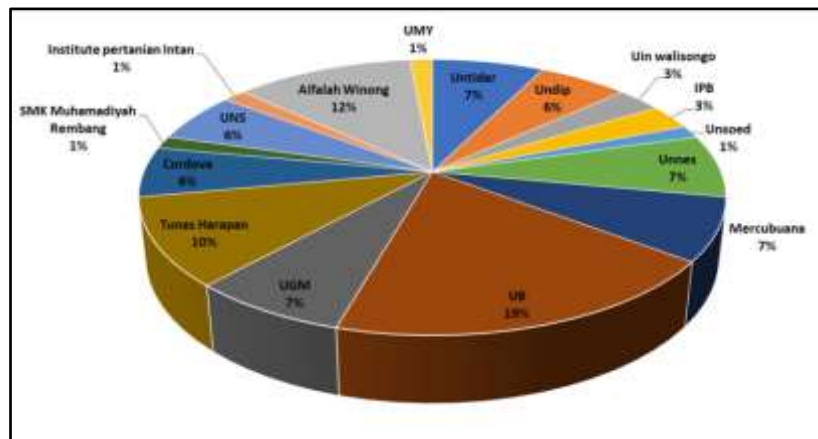
Gambar 42. Komposisi Pengunjung BPSI Lingkungan Pertanian

5.9 Praktek Kerja Lapang dan Magang (MBKM dan Reguler)

Magang dapat menjadi sarana efektif untuk penyebarluasan hasil standarisasi instrumen lingkungan pertanian yang dihasilkan oleh BPSI Lingkungan Pertanian. Magang tidak hanya berfungsi sebagai media pembelajaran, tetapi juga sebagai cara untuk mempraktikkan hasil-hasil tersebut dalam dunia nyata dan memperkenalkannya kepada masyarakat luas. BPSI Lingkungan Pertanian memiliki 3 layanan jenis magang yaitu Praktek Kerja Lapang (PKL)/Praktek Kerja Industri (prakerin) Sekolah Menengah, Magang Reguler, dan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Pada tahun 2024, sebanyak 68 orang yang telah melaksanakan magang di BPSI Lingkungan Pertanian yang berasal dari berbagai sekolah/ perguruan tinggi, bidang keilmuan, serta lama waktu magang yang beragam. Peserta terbanyak berasal dari Universitas Brawijaya sebanyak 13 orang dan SMK Alfalah Winong sebanyak 8 orang. Jenis magang yang banyak diikuti yaitu magang reguler dan prakerin. Adapun waktu magang paling lama adalah 6 bulan dan paling singkat adalah 14 hari.

Tabel 27. Daftar Peserta Magang di BPSI Lingkungan Pertanian

No.	Asal Sekolah	Jumlah (orang)	Lama Magang	Bidang Keilmuan	Jenis Magang
1	Universitas Tidar	5	1 bulan	Pertanian	Reguler
2	Universitas Diponegoro	4	35 hari	Pertanian	Reguler
3	UIN Walisongo	2	1 bulan	Pertanian	Reguler
4	Institut Pertanian Bogor	2	14 hari	Pertanian	Mandiri
5	Universitas Jenderal Soedirman	1	1 bulan	Pertanian	Reguler
6	Universitas Negeri Semarang	5	4,5 bulan	Kimia	Reguler
7	Universitas Mercubuana Yogyakarta	5	1 bulan	Pertanian	Reguler
8	Universitas Brawijaya	13	6 bulan	Agribisnis/Budidaya Pertanian/Hama dan Penyakit	Reguler
9	Universitas Gajah Mada	5	4 bulan	Ilmu Tanah	MBKM
10	Universitas Sebelas Maret	4	1 bulan	Ilmu Tanah	Reguler
11	Universitas Muhamadiyah Yogyakarta	1	3 bulan	Agroekoteknologi	Reguler
12	Institut Pertanian INTAN Yogyakarta	1	2 bulan	Agroekoteknologi	Reguler
13	SMK Muhammadiyah Rembang	1	5 bulan	Desain Komunikasi Visual	PKL/prakerin
14	SMK Tunas Harapan Pati	7	6 bulan	Analisis pengujian	PKL/prakerin
15	SMK Alfalah Winong	8	4-6 bulan	Akuntansi	PKL/prakerin
16	SMK Cordova	4	4 bulan	Teknik Kimia Industri	PKL/prakerin



Gambar 43. Komposisi Peserta Magang BPSI Lingkungan Pertanian

5.10 Kegiatan Pendampingan

Pada tahun 2024, terdapat 15 permintaan kegiatan pendampingan/narasumber baik dari instansi pemerintahan, perusahaan swasta, universitas, dan sekolah. Topik yang diminta cukup beragam meliputi perubahan iklim, pendampingan dalam melakukan sampling GRK, pertanian ramah lingkungan, residu pestisida, dan pelatihan pembuatan produk ramah lingkungan.

Tabel 28. Kegiatan pendampingan/narasumber BPSI Lingkungan Pertanian

No.	Kegiatan	Narasumber	Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan
1	Pelaksanaan sampling pengukuran emisi GRK	Miranti Ariani, Ali Pramono	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	17 Januari-7 Maret 2024
2	Pendampingan Lomba Karya Ilmiah Tingkat SMA	Wahyu Purbalisa, Nurhasan, Baiq Nunung S., Hesti Yulianingrum	SMAN 1 Jakenan	Februari-Maret 2024
3	Workshop Pengenalan metode <i>Alternate Wet and Dry</i> (AWD) dan pelatihan pengambilan sampel GRK pada padi sawah	Ali Pramono	RIZE Pte. Ltd.	22 Februari 2024
4	Pengelolaan limbah jerami padi	Dolty Mellyga W.P., Edi Suprptomo, Kundono	BSIP Jawa Tengah	5 Maret 2024
5	Budidaya jagung ramah lingkungan: Pengenalan teknologi ramah lingkungan siap terap pada komoditas jagung	Ali Pramono	BSIP Jawa Timur	6-8 Mei 2024
6	Pemanfaatan biochar dari perkebunan kelapa sawit untuk peningkatan ketahanan pangan dalam rangka keamanan nasional	Miranti Ariani	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	5 Juni 2024

No.	Kegiatan	Narasumber	Penyelenggara	Waktu Pelaksanaan
7	Revolusi Agrikultur Harmonis: Antisipasi yang unggul untuk masa depan pertanian	Slamet Riyanto, Nurhasan	Institut Pertanian Bogor	13 Juli 2024
8	Pelatihan pembuatan kompos	Dolty Mellyga W.P., Edi Suprptomo	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	29 Juli 2024
9	Cara peningkatan program yang relevan mengenai inovasi, teknik pertanian dan kebijakan dalam sektor pertanian	Eni Yulianingsih, Wahyu Purbalisa	Keluarga Mahasiswa Pati di Surakarta	2 Agustus 2024
10	Penguatan SRN-PPI melalui pengembangan metodologi sektor pertanian	Ali Pramono	Direktorat Jenderal Hortikultura	13 Agustus 2024
11	FGD Tindak lanjut hasil pengawasan logam berat pada beras	Wahyu Purbalisa	Badan Pangan Nasional	20 Agustus 2024
12	FGD Inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi	Ina Zulaehah, Suharsih	BPSIP D.I. Yogyakarta	21 Agustus 2024
13	Perumusan batas maksimum residu pestisida pada pangan segar asal tumbuhan	Ina Zulaehah	Kementerian Perdagangan	27 September 2024
14	Pelatihan GRK	Ali Pramono	Syngenta	15 Oktober 2024
15	Bimbingan Teknis Climate smart agriculture di Prov. NTB	Baiq Nunung S., Edi Suprptomo	Balai Pelatihan Pertanian dan Perkebunan NTB	23-25 Oktober 2024

5.11 Pameran/Ekspose

BPSI Lingkungan Pertanian mengikuti satu kegiatan pameran yaitu Jateng Agro-Innovation Expo (JAE). Kegiatan pameran ini digelar di Jateng Agro Center, Soropadan pada tanggal 21-26 Agustus 2024. Adapun produk dan teknologi yang ditampilkan oleh BPSI Lingkungan Pertanian dalam pameran yaitu GC Portabel untuk pengukuran emisi gas rumah kaca, miniatur teknologi pertanian ramah lingkungan, beberapa produk ramah lingkungan seperti biopestisida, biokompos, kompos, biochar, ubichar (urea berlapis biochar), dan produk olahan pascapanen.



Gambar 44. BPSI Lingkungan Pertanian di Jateng Agro-Inovation Expo (JAE)

5.12 Perpustakaan

Perpustakaan BPSI Lingkungan Pertanian memiliki koleksi sebanyak 2.558 judul. Selama tahun 2024, pengembangan koleksi dengan menambah koleksi baru sebanyak 31 judul buku, 6 judul leaflet, 48 majalah dan 85 laporan magang. Jumlah koleksi yang sudah di *upload* dalam website perpustakaan (<https://kikp-pertanian.id/bpsilingkungan/>) sebanyak 2.473 judul. Koleksi majalah dan laporan magang sebanyak 85 judul masih dalam proses *input* ke website. Koleksi tambahan ini harapannya dapat menambah referensi bagi pengunjung umum perpustakaan. Jumlah anggota perpustakaan pada tahun 2024 yaitu sebanyak 206 anggota. Pada tahun ini terdapat penambahan anggota sebanyak 77 orang yang berasal dari mahasiswa MBKM dan magang serta siswa SMK yang magang di BPSI Lingkungan Pertanian. Kunjungan pengguna layanan perpustakaan selama 1 tahun sebanyak 736 orang. Komposisi pengunjung terdiri dari PNS, Mahasiswa dan siswa magang.

Tabel 29. Daftar Kunjungan di Perpustakaan BPSI Lingkungan Pertanian

No.	Bulan	Kunjungan	Peminjaman Buku
1	Januari	90	-
2	Februari	107	-
3	Maret	66	-
4	April	38	-
5	Mei	73	-
6	Juni	50	-
7	Juli	52	-
8	Agustus	68	-
9	September	47	-
10	Oktober	48	-
11	November	44	-
12	Desember	53	1
Total		736	1

Selain menambah koleksi buku, perpustakaan BPSI Lingkungan Pertanian juga aktif melakukan promosi perpustakaan di media sosial yang berisi mengenai lama pelayanan, jenis layanan yang tersedia dan jenis koleksi buku. Kegiatan promosi ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pengguna layanan perpustakaan yang membutuhkan informasi buku terkait pertanian. Kegiatan promosi juga dilakukan kepada pengguna layanan perpustakaan dengan menggunakan grup whatsapp terkait koleksi yang tersedia di perpustakaan. Dalam promosi tersebut juga dilengkapi link dan *QR barcode* untuk memudahkan pengguna layanan perpustakaan mengakses koleksi di perpustakaan BPSI Lingkungan Pertanian.



Gambar 45. Promosi Koleksi Perpustakaan Melalui Media Sosial dan Whatsapp

5.13 Pengelolaan Media Sosial dan Website

Penyebarluasan informasi melalui media sosial dan website adalah strategi yang efektif dalam menjangkau audiens yang lebih luas. BPSI Lingkungan Pertanian menggunakan berbagai *platform digital* sebagai upaya penderasan informasi berbagai layanan, informasi, teknologi yang dihasilkan oleh BPSI Lingkungan Pertanian kepada masyarakat luas.

Tabel 30. Platform media sosial BPSI Lingkungan Pertanian

No.	Nama Platform	Username/ Link
1	Facebook	bsip_lingkungan
2	Instagram	bsip_lingkungan
3	Twitter/X	bsip_lingkungan
4	Youtube	bsip_lingkungan
5	Tiktok	bsip_lingkungan
6	Website	https://lingkungan.bsip.pertanian.go.id/
7	Portal PPID	https://lingkungan-bsip-ppid.pertanian.go.id/

Penggunaan *platform digital* seperti instagram, facebook, twitter, tiktok, website, dan youtube merupakan elemen penting dalam strategi komunikasi digital Tim Media Sosial dan Website. Setiap platform menawarkan fitur dan audiens yang berbeda, sehingga dapat menjadi cara yang paling efektif. Instagram dan facebook, misalnya, sangat berguna untuk berbagi konten visual dan membangun komunitas dengan cara yang interaktif. Instagram dikenal dengan foto dan video pendek yang menarik, sementara Facebook memungkinkan berbagi berbagai jenis konten termasuk teks, gambar, dan video panjang, serta membangun grup komunitas. Twitter, lebih fokus pada penyebaran informasi cepat dan terhubung dengan audiens melalui *tweet* yang singkat dan *hashtag*. Youtube menyediakan platform untuk video yang lebih panjang dan mendalam, ideal untuk tutorial, ulasan, atau konten hiburan yang lebih kaya. Dengan memanfaatkan kekuatan masing-masing platform ini, diharapkan dapat mengoptimalkan jangkauan dan dampak komunikasi, serta meningkatkan keterlibatan dan loyalitas audiens.

Jenis berita yang dihasilkan oleh Tim Media Sosial dan Website meliputi laporan tentang kegiatan balai dan infografis yang dirancang untuk menyampaikan informasi dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Berita mengenai kegiatan balai mencakup laporan dan dokumentasi acara, seminar, workshop, atau pertemuan yang diselenggarakan oleh organisasi. Konten ini disajikan dalam bentuk artikel, foto, dan video yang menyoroti aktivitas penting dan pencapaian yang dicapai. Di sisi lain, infografis adalah alat visual yang efektif untuk menyajikan data kompleks dan statistik dengan cara yang ringkas dan menarik. Infografis ini membantu masyarakat memahami informasi dengan lebih cepat dan jelas melalui grafis, diagram, dan elemen visual lainnya. Kedua jenis berita ini berfungsi untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat, memperkuat pesan organisasi, dan memberikan nilai tambah melalui penyajian informasi yang terstruktur dan mudah diakses.

Tabel 31. Postingan berita pada berbagai platform media sosial BPSI Lingkungan Pertanian

No.	Bulan	Jenis Platform						
		Facebook	Instagram	Twitter /X	Tiktok	Youtube	Webiste	Portal PPID
1	Januari	25	34	23	1	4	23	23
2	Februari	31	31	31	2	4	24	24
3	Maret	29	29	29	2	3	28	28
4	April	30	30	30	2	2	31	31
5	Mei	44	44	44	1	2	45	45
6	Juni	36	36	36	0	2	34	34
7	Juli	45	45	45	2	2	41	41
8	Agustus	59	59	59	2	2	54	54

No.	Bulan	Jenis Platform						
		Facebook	Instagram	Twitter /X	Tiktok	Youtube	Webiste	Portal PPID
9	September	55	55	55	3	2	43	43
10	Oktober	38	38	38	2	2	27	29
11	November	29	29	29	3	3	23	24
12	Desember	27	27	27	1	22	22	1
Jumlah		448	457	446	21	50	395	337

5.14 Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

Dalam pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) digunakan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima pelayanan. Kuesioner disusun berdasarkan tujuan survei terhadap tingkat kepuasan masyarakat. Pada semester I TA 2024, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPSI Lingkungan Pertanian adalah 89,39 atau kategori Sangat Baik dengan responden sebanyak 140 orang. Sedangkan pada semeseter II, nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BPSI Lingkungan Pertanian adalah 87,23 atau kategori Baik dengan responden sebanyak 398 orang.

Tabel 32. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

No.	Unsur Pelayanan	Semester I		Semester II	
		Nilai rata-rata	Mutu pelayanan	Nilai rata-rata	Mutu pelayanan
U1	Persyaratan	3,64	A	3,50	B
U2	Prosedur	3,62	A	3,38	B
U3	Waktu pelayanan	3,58	A	3,38	B
U4	Biaya/tarif	3,38	B	3,44	B
U5	Produk layanan	3,63	A	3,48	B
U6	Kompetensi pelaksana	3,69	A	3,60	A
U7	Perilaku pelaksana	3,64	A	3,72	A
U8	Penanganan pengaduan saran dan masukan	3,64	A	3,65	A
U9	Sarana dan Prasarana	3,68	A	3,57	A
Nilai indeks		3,58		3,49	
IKM		89,39		87,23	
Mutu pelayanan		A		B	
Kinerja		Sangat Baik		Baik	

5.15 Pelaksanaan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan dan Survei Persepsi Anti Korupsi

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), BPSI Lingkungan Pertanian berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Komitmen tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan dilaksanakannya Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yang menjadi salah satu parameter pemerintahan yang melayani dan bersih.

Pelaksanaan SPKP dan SPAK dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga bulan) atau Triwulan sebagai bahan evaluasi untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan konsistensi penerapan budaya anti korupsi. Hasil dari pelaksanaan SPKP dan SPAK ini diharapkan mampu memacu peningkatan kualitas pelayanan publik unit kerja dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPSI Lingkungan Pertanian.

Tabel 33. Nilai Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan dan Indeks Persepsi Anti Korupsi

No.	Nilai	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1	IPKP	3,56	3,39	3,44	3,47
2	IPAK	3,66	3,57	3,41	3,61

5.16 Paten

Pada tahun 2024, BPSI Lingkungan Pertanian telah melakukan pemilahan paten dan pengajuan perubahan data kepemilikan pada sertifikat paten dari Balitbangtan menjadi BSIP sebanyak 17 paten. Selain itu, telah dilakukan penilaian atas tingkat komersial paten terhadap 3 judul yang pernah diajukan proses pendaftaran paten pada tahun 2022. Penilaian dilakukan untuk melihat potensinya untuk dikomersialisasi oleh industri atau mitra lainnya. Hasil pertimbangan dan penilaian ini nantinya akan menjadi bagian dari selektifnya pertimbangan melanjutkan pada pemeriksaan substansi di internal BSIP, terutama mempertimbangkan pemanfaatannya di masyarakat atas paten-paten tersebut.

Tabel 34. Daftar Penilaian Atas Tingkat Komersial Paten

No.	Judul Paten	Nomor Pendaftaran	Tim Inventor	Hasil Penilaian Komersialisasi
1	Perangkat uji residu pestisida	P00202206232	Wahyu Purbalisa dkk	Belum ada mitra pelisensi
2	Sistem Irigasi Otomatis dan Perangkat Hama Berbasis Sistem Pakar di Lahan Hortikultura	P00202206344	Likco Desvian Herindra dkk	Sudah ada mitra pelisensi
3	Alat Deteksi Cepat Logam Berat Portable Berbasis Android	P00202206502	Sukarjo dkk	Belum ada mitra pelisensi

Pada tanggal 18 Desember 2024 telah diadakan konsultasi teknis tinjauan spesifikasi paten Perangkat Uji Residu Pestisida. Rincian hasil konsultasi yaitu : (1) Perbaikan isi bidang teknik invensi, (2) Perbaikan isi uraian singkat invensi, (3) Perbaikan penggunaan istilah asing agar diubah ke dalam Bahasa Indonesia atau dicetak miring, (4) Perbaikan isi klaim, dan (5) Pemeriksa menyarankan dokumen berubah menjadi paten sederhana. Sementara itu, untuk paten Formula Biopestisida Multifungsi yang Ramah Lingkungan dengan nomor paten IDS000002304 yang dilisensikan kepada CV. Sabar Bersaudara sudah dilakukan evaluasi oleh pihak BISIP. Hasil evaluasi, pihak mitra tidak akan melanjutkan/memperpanjang lisensi kembali dikarenakan sudah tidak lagi melakukan produksi dan tidak ada pasar untuk menjual produk tersebut. Dengan demikian CV. Sabar Bersaudara akan mengembalikan lisensi paten tersebut.

5.17 Publikasi

Pada tahun 2024, BPSI Lingkungan Pertanian telah ikut berkontribusi dalam penulisan naskah pada Warta Sumber Daya Lahan Pertanian. Warta diterbitkan oleh Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian dan memuat tulisan-tulisan populer atau semi ilmiah di bidang sumber daya lahan dan perubahan iklim pertanian. Warta merupakan salah satu media komunikasi dalam menyebarluaskan informasi guna meningkatkan wawasan tentang lahan pertanian, tanah, lingkungan, agroklimat, rawa dan lainnya.

Tabel 35. Daftar Publikasi BPSI Lingkungan Pertanian di Warta Sumber Daya Lahan Pertanian

No.	Judul	Penulis	Edisi Terbit
1	Status dan Capaian Penurunan Emisi GRK Sektor Pertanian	Miranti Ariani, Titi Sopiawati	Warta Sumber Daya Lahan Pertanian Volume 1 Nomor 1, Agustus 2024.
2	Pemanfaatan Cendawan dan Bakteri Sebagai Agen Pendegradasi Residu Pestisida pada Lahan Pertanian	Ria Fauriah, Anik Hidayah	Warta Sumber Daya Lahan Pertanian Volume 1 Nomor 2, Desember 2024.

5.18 Kerjasama

Pada tahun 2024, BPSI Lingkungan Pertanian memiliki beberapa kegiatan kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri. Kegiatan kerjasama ini ada yang telah berjalan sejak tahun 2018 dan beberapa baru dimulai tahun 2024 ini. Mekanisme kerjasama yang digunakan yaitu hibah dan swakelola.

Tabel 36. Daftar Kerjasama BPSI Lingkungan Pertanian

No.	Mitra/Donor	Judul Kegiatan	Periode Kerjasama	Penanggung Jawab	Mekanisme
1	National Agriculture and Food Research Organization (NARO)-JEPANG	Development of Comprehensive Rice Cultivation Technologies that Reduce Greenhouse Gas Emmission in Asia	27 November 2018 - 31 Januari 2025	Ali Pramono	Hibah Luar Negeri
2	Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS)-JEPANG	Implementation of the second and third field experiments for MACS project in Indonesia	12 Mei 2023 - 31 Desember 2024	Ali Pramono	Hibah Luar Negeri
3	Rize PTE.LTD	Quantifying the GHG Emissions from Paddy Rice Fields under Conventional Flooding and Alternate Wetting And Drying (AWD) System	2024 - 2029	Ali Pramono	Swakelola
4	Institut Pertanian Bogor	Effect of silicate fertilizer application on rice productivity and methane (CH ₄) emission in Indonesia	19 Maret 2024 - 19 Maret 2025	Miranti Ariani	Swakelola

5.19 Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian

Untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pertanian yang berkualitas dan andal perlu dilakukan upaya peningkatan pengetahuan dan keterampilan, salah satunya yaitu melalui bimbingan teknis. Bimbingan teknis ini bertujuan meningkatkan kapasitas penerap standar instrumen lingkungan pertanian guna mendukung program Kementerian Pertanian. Bimbingan teknis penguatan kapasitas penerap standar pertanian mendukung program Kementerian Pertanian dilaksanakan pada bulan Oktober-Desember 2024 di lokasi yang berbeda yaitu di Kab. Kudus dan Kab. Pati dengan jumlah peserta sebanyak 300 orang yaitu akademisi, penyuluh, dan petani. Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Program Kementerian Pertanian efektif dalam meningkatkan

kapasitas penerap standar pertanian (akademisi, penyuluh, dan petani). Peningkatan pengetahuan peserta untuk di Kab. Kudus yaitu 21,20%, sedangkan di Kab. Pati yaitu 13,31%. Bimbingan teknis juga meningkatkan keterampilan peserta dalam pengukuran emisi gas metana (CH_4) dan dinitrogen oksida (N_2O). Respon berupa sikap dan minat peserta bimbingan teknis termasuk dalam kategori setuju hingga sangat setuju. Hasil evaluasi memperlihatkan bahwa penyelenggaraan bimbingan teknis di Kab. Kudus dan Kab. Pati termasuk dalam kategori sangat baik.



Gambar 46. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian di Kab. Kudus dan Kab. Pati

Pada Tahun 2024, BPSI Lingkungan Pertanian telah menghasilkan satu usulan rancangan standar PNPS yang telah diusulkan pada BSN berjudul Metode Pengukuran Emisi Gas Metana (CH₄) dan Dinitrogen Oksida (N₂O) di Lahan Sawah – Bagian 2: Spesifikasi dan Pengoperasian Sungkup Tertutup untuk dirumuskan pada Komite Teknis 13-15 Perubahan Iklim. Selain itu juga menghasilkan 3 (tiga) RSNI yang kemudian telah ditetapkan sebagai SNI 2024 yaitu:

1. SNI 9282:2024 tentang Pengelolaan hama terpadu ulat grayak (*Spodoptera frugiperda* J.E. Smith) pada tanaman jagung melalui Surat Keputusan Kepala BSN Nomor 547/KEP/BSN/11/2024.
2. SNI ISO 23646:2022 tentang Kualitas tanah – Penentuan kadar pestisida organoklorin menggunakan kromatografi gas dengan deteksi selektif massa (GC-MS) dan kromatografi gas dengan deteksi penangkapan elektron (GC-ECD) melalui Surat Keputusan Kepala BSN Nomor 509/KEP/BSN/10/2024.
3. SNI 7313:2024 tentang Batas maksimum residu pestisida pada komoditas pertanian asal tumbuhan melalui Surat Keputusan Kepala BSN Nomor 648/KEP/BSN/12/2024.

Capaian kinerja lainnya antara lain dipertahankannya sertifikat akreditasi laboratorium sesuai SNI ISO IEC 17025:2017 pada laboratorium BPSI Lingkungan Pertanian dengan Nomor LP-556-IDN dan sertifikat SNI ISO 9001:2015 pada BPSI Lingkungan Pertanian. BPSI Lingkungan Pertanian juga meraih predikat informatif dan petugas PPID terbaik pada penilaian KIP. Capaian kinerja di bidang keuangan, BPSI Lingkungan Pertanian menjadi Satker III terbaik penilaian indikator kinerja IKPA. Kegiatan layanan telah dilaksanakan di BPSI Lingkungan Pertanian, diantaranya layanan pengujian laboratorium, layanan kunjungan agroeduwisata, layanan magang, layanan pendampingan dan layanan kegiatan bimtek terkait standar pertanian. Capaian Kinerja layanan dapat dilihat dari Nilai IKM tahun 2024 yang masuk kategori sangat baik (89,39) pada semester I dan kategori baik (87,23) pada semester II. Kegiatan penyebaran informasi BPSI Lingkungan Pertanian pada tahun 2024 telah memposting 2154 berita dan info grafis melalui platform media sosial.

Selanjutnya pengelolaan dan alokasi pagu anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan di BPSI Lingkungan Pertanian telah direalisasikan dengan baik berdasarkan program dan kegiatan yang ditetapkan, meskipun ada pagu anggaran blokir. Progres dan realisasi anggaran semua jenis belanja terserap mencapai 99,16% dari pagu efektif, hal ini menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024 penyerapan anggaran berjalan sangat baik dan pelaksanaan kegiatan sudah berjalan sebagaimana mestinya.

Upaya memaksimalkan capaian dari target output yang telah ditetapkan pada renstra yang mengacu pada indikator kinerja utama (IKU) secara keseluruhan sepanjang tahun 2024 telah tercapai walaupun masih terdapat beberapa kegiatan layanan yang terkendala blokir anggaran. Namun secara keseluruhan program/kegiatan BPSI Lingkungan Pertanian hasilnya sesuai dengan yang ditetapkan dan masih memerlukan evaluasi dan perencanaan yang tepat dalam upaya mencapai kinerja terbaik.

Semoga Laporan Tahunan 2024 ini dapat memberikan gambaran dan informasi yang jelas tentang perkembangan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BPSI Lingkungan Pertanian selama tahun 2024. Selain itu, Laporan Tahunan 2024 ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi institusi serta dijadikan acuan dalam merencanakan dan mengembangkan program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya serta dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.